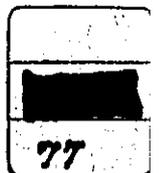


REPUBLIK INDONESIA
LTA-14
STUDI PENGEMBANGAN REGIONAL JAWA
PHASE I, BAGIAN B
JAWA TENGAH

LAPORAN AKHIR

Nopember, 1977

BADAN KERJASAMA INTERNASIONAL JEPANG



JICA LIBRARY



1049408[6]

STUDI PENGEMBANGAN REGIONAL JAWA
PHASE I, BAGIAN B
J A W A T E N G A H

LAPORAN AKHIR

VOLUME I

RINGKASAN DAN REKOMENDASI

国際協力事業団	
受入 月日	'84. 3. 21
	108
	36
登録No	01658
	PLC

Laporan mengenai Indonesia ini adalah terjemahan dari Volume I, Summary and Recommendations of the Republic of Indonesia, LTA-14, Java Regional Study-Phase I, Part B, Central Java, Final Report, November 1977.

Hal ini dipersiapkan sehubungan dengan Scope of Work for Java Regional Study, Phase I, Part B, Central Java, Indonesia, atas persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang pada bulan Oktober 1976. Atas pertanggungjawaban dari perjanjian tersebut, JICA (Japan International Cooperation Agency) mengorganisir suatu study team dengan bantuan dari the International Development Center of Japan. Setelah mengadakan pembicaraan dengan pejabat² dari Pemerintah Indonesia, study team tersebut mengadakan survey lapangan selama 77 hari dimulai dari 9 Januari sampai dengan 26 Maret, 1977. Laporan akhir adalah hasil dari survey lapangan yang giat dan penyelidikan yang teliti.

Untuk keterangan yang mendetail dari setiap subjek dipersilahkan untuk melihat pada chapter yang bersangkutan pada laporan akhir.

D A F T A R I S I

	Halaman
VOLUME I	
KATA PENGANTAR	
SURAT PERNYATAAN	
RINGKASAN DAN REKOMENDASI	
S.1 PANDANGAN UMUM	1
S.1.1 Keadaan sekarang	1
S.1.2 Alternatif Strategi Pembangunan	9
S.1.3 Rekomendasi Strategi Pembangunan	16
S.2 URAIAN SINGKAT SEKTORAL DAN REKOMENDASI	27
S.2.1 Sumber-sumber Kemanusiaan	27
S.2.2 Pengembangan Sumber-sumber Air	29
S.2.3 Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan	31
S.2.4 Pemasaran Hasil Pertanian dan Organisasi Pedesaan ...	34
S.2.5 Pertambangan dan Industri Pengolahan	35
S.2.6 Kepariwisataaan	38
S.2.7 Pengangkutan	39
S.2.8 Pelayanan Kepentingan Umum	40
S.2.9 Pemukiman dan Fasilitas Kemasyarakatan	42
S.2.10 Pembangunan Sosial	45
S.2.11 Administrasi Perencanaan	49
S.2.12 Anggaran Pembangunan	50

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

	Halaman
RINGKASAN DAN REKOMENDASI	
Tabel S.1. Investasi Pemerintah yang direkomendasikan untuk Jawa Tengah 1978/1979 – 1983/1984	22
Tabel S.2. Program Investasi yang direkomendasikan oleh Pemerintah Pusat di Jawa Tengah menurut sektor 1978/1979 – 1983/1984	22
Grafik S.1. Pembagian Geografis potensi-potensi Pembangunan	10
Grafik S.2. Perkiraan Pertumbuhan Produksi Domestik Regional Bruto (GRDP) per Kapita berdasarkan Strategi Alternatif I	18
Grafik S.3. Perkiraan Pertumbuhan Produksi Domestik Regional Bruto (GRDP) per Kapita berdasarkan Strategi Alternatif II	19
Grafik S.4. Perkiraan Pertumbuhan Produksi Domestik Regional Bruto (GRDP) per Kapita apabila Strategi yang diusulkan digunakan	20
Grafik S.5. Prioritas Daerah-daerah Pembangunan	23

SURAT - PERNYATAAN

Tuan Shinsaku Hogen
Presiden Badan Kerjasama Internasional Jepang
Shinjuku Mitsui Building, Nishi - Shinjuku 2 - 1
Shinjuku - ku Tokyo - Jepang.

Yth. Tuan Hogen,

Dengan sangat gembira saya serahkan kepada anda laporan akhir yang berjudul "REPUBLIK INDONESIA" Studi Pengembangan Regional Jawa - Phase I Bagian B. Jawa Tengah.

Laporan ini telah dipersiapkan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani tanggal 20 Desember 1976 oleh Badan Kerjasama Internasional Jepang dan Pusat Pembangunan Internasional Jepang.

Pusat Pembangunan Internasional Jepang bertanggung jawab pada studi ini dengan mempekerjakan satu team ahli yang dipimpin oleh Dr. Koichi Mera; dua misi telah dikirimkan ke Indonesia.

Puncak studi ialah suatu pelaksanaan studi lapangan yang intensif yang dilaksanakan sejak 9 Januari 1977 sampai dengan 26 Maret 1977.

Team studi lapangan yang intensif ini terdiri dari :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Dr. Koichi Mera | : Pimpinan Team, ahli ekonomi Regional |
| 2. Tuan Kazuo Hosoda | : Ahli Sumber Air dan Ketenagaan |
| 3. Tuan Motonaga Ohto | : Ahli Ekonomi Pertanian |
| 4. Tuan Ichiro Inukai | : Ahli Ekonomi Industri |
| 5. Tuan Yuji Morioka | : Perencana Perhubungan dan Kepariwisataaan |
| 6. Tuan Yoshifusa Naito | : Ahli Organisasi Pedesaan dan Pemasaran |
| 7. Tuan Motohisa Kaneko | : Perencana Sosial dan Sumber-sumber Kemanusiaan |
| 8. Dr. Susumu Hondai | : Ahli Ekonomi Umum dan Keuangan |
| 9. Tuan Hiroshi Ueno | : Perencana Fasilitas Kemasyarakatan |

Dalam pelaksanaan studi lapangan yang intensif dan kegiatan kantor pusat di Semarang team ini dibantu oleh suatu team pendamping yang terdiri dari :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Drs. Soesiladi | : Koordinator Team Pendamping Ketua BAPPEDA Jawa Tengah. |
| 2. Ir. MP. Simatupang | : Koordinator Hubungan dengan Pemerintah Pusat, Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah - Dep. PUTL. |
| 3. Drs. Suwito Laksono | : Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah - Dep. PUTL. |

4. Drs. M. Soeprapto : BAPPEDA Jawa Tengah
5. Ir. Mulyono Barun : BAPPEDA Jawa Tengah
6. Ir. Suwandi : Dinas Pekerjaan Umum, Jawa Tengah
7. Ir. Soewardi : Dinas Perindustrian, Jawa Tengah
8. Mulyoto B.Sc. : Dinas Pertanian, Jawa Tengah

Disamping itu beberapa orang telah turut memberikan sumbangan terhadap studi ini dalam berbagai bentuk dan tahap di Tokyo.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada beberapa orang di Indonesia yang telah membantu misi kami dalam berbagai cara.

Ucapan terima kasih khususnya kami tujukan kepada anggota Panitia Pengarah Studi Pengembangan Regional yang diketuai oleh Bapak Ir. Rachmat Wiradisuria, Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen PUTL, dan Bapak Prof. Madjid Ibrahim, Deputy V BAPPENAS.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir. Salmon Kodijat, Direktur Tata Kota dan Tata Daerah, yang telah mengatur seluruh pelaksanaan studi termasuk pembentukan team pendamping.

Terima kasih kami juga disampaikan kepada individu-individu di Jawa Tengah yang telah membantu kami dalam pelaksanaan studi ini disana.

Teruma kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah Supardjo dan Bapak Soesiladi Ketua BAPPEDA Jawa Tengah.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap orang pada tingkat Departemen di Indonesia, Kedutaan Jepang di Jakarta dan Kementerian Luar Negeri Jepang di Tokyo.

Terakhir sekali yang tidak kurang pentingnya, kami sampaikan penghargaan yang tertinggi-tingginya atas usaha dan kerjasama erat yang diberikan kepada kami oleh Badan Kerjasama International Jepang.

Nopember, 1977.



SABURO KAWAI

President Pusat Pembangunan
International Jepang

RINGKASAN DAN REKOMENDASI-REKOMENDASI

S.1 PANDANGAN UMUM

S.1.1 KEADAAN SEKARANG

a. Umum

- S.001 Propinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian tengah P. Jawa dapat ditandai dengan jumlah penduduk yang sangat besar yang sebagian besar berada di sektor pertanian dan sangat disayangkan berpenghasilan rendah. Dapat ditambahkan, dilihat dari seluruh indikator ekonomi, Jawa Tengah relatif menunjukkan adanya stagnasi.
- S.002 Pada saat ini penduduk Propinsi Jawa Tengah diperkirakan mendekati 24 juta atau kira-kira 1/3 dari penduduk Pulau Jawa (termasuk Madura) atau 1/5 dari jumlah penduduk Indonesia. Karena Pulau Jawa secara relatif termasuk daerah yang homogen maka Jawa Tengah dapat dibandingkan dengan daerah lainnya di Pulau Jawa.
- S.003 Dilihat dari segi pendapatan, Jawa Tengah tertinggal di belakang oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Pendapatan per kapita Jawa Tengah untuk tahun 1971 kira-kira 70 % dari rata-rata nasional dan menurun menjadi 55 % pada tahun 1975. (lihat seksi 14.3.3.).
- S.004 Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Propinsi Jawa Tengah tidak hanya terbelakang dalam tingkat pendapatan tetapi juga dalam hal pertumbuhan ekonomi. Perekonomian nasional berkembang dengan kecepatan lebih dari 7 % per tahun sejak Repelita I akan tetapi tingkat perkembangan perekonomian Jawa Tengah nampaknya sedikit lebih besar diatas 4 % (lihat tabel 1.10 halaman 1-22). Pertumbuhan ini juga lebih kecil dibandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur.
- S.005 Keadaan yang tidak menguntungkan untuk Jawa Tengah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Dari faktor tersebut diantaranya diketemukan dalam faktor historis, alamiah dan faktor luar lainnya yang berada di luar kekuasaan penduduk Jawa Tengah.
- ##### b. Keadaan Geografis
- S.006 Pulau Jawa memanjang dari Timur ke Barat yang kurang lebih homogen dilihat dari segi khasanah alamiah. Sebagian besar daerah pantai utara datar yang

terutama digunakan untuk tanaman padi, sedangkan sebagian besar daerah pantai Selatan adalah daerah pegunungan. Di bagian tengah diantara dua garis pantai Utara dan Selatan ada sederetan gunung berapi yang masih aktif dan daerah bukit-bukit disekitarnya. Daerah perbukitan tersebut kurang subur dibandingkan dengan daerah dataran.

- S.007 Pembangunan Pulau Jawa yang modern, atau bangsa dalam persoalan ini telah diarahkan oleh kegiatan-kegiatan perkotaan (urban) yang meliputi daerah administrasi, distribusi sampai ke industri pengolahan. Dua pusat perkotaan yang besar – Jakarta dan Surabaya sebagai hasil dari perkembangan itu. Pada mulanya kedua kota tersebut tumbuh sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan, yang kemudian menjadi pusat aktivitas industri pengolahan. Kedua kota tersebut tumbuh disebabkan oleh perdagangan external yang dimungkinkan karena adanya fasilitas pelabuhan yang baik. Propinsi Jawa Tengah tidak memiliki pelabuhan yang sedemikian sampai dibangunnya pelabuhan Cilacap beberapa tahun yang lalu, dan juga tidak dekat dengan kota perdagangan.

c. Keadaan Perekonomian.

- S.008 Jawa Tengah pernah menjadi pusat kebudayaan di Jawa seperti juga Yogyakarta. Propinsi Jawa Tengah terkenal dengan keahlian tradisional dalam pencelupan batik yang masih dipertahankan di Pekalongan, Surakarta dan dimana-mana, demikian juga dengan keahlian kerajinan tangan. Bahkan pada saat ini sejumlah industri kecil di Jawa Tengah jauh melebihi perkembangannya seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur.
- S.009 Namun demikian industri-industri tradisional itu mendapat saingan yang keras dari pabrik-pabrik modern. Industri tekstil merupakan contoh yang nyata. Batik-batik tradisional meskipun bagus dan menarik mereka tidak dapat bersaing dengan produksi massal yang murah dari batik cetak. Dapat ditambahkan bahwa selera masyarakat telah berpindah ke tata cara Barat yang dapat dihasilkan lebih cepat secara domestik di Jakarta atau di Surabaya.
- S.010 Akibatnya industri-industri tradisional di Jawa Tengah mengalami kemandegan baik dalam arti jumlah industri maupun dalam skala produksinya.

d. Keadaan Demografi.

- S.011 Dulunya penduduk Jawa Tengah dapat menjaga keseimbangan dengan produktivitas tanah. Keseimbangan ini menjadi rusak setelah kemerdekaan karena ada peningkatan jumlah penduduk sebagai akibat adanya pengenalan pengobatan dengan teknologi modern dan perbaikan kondisi gizi. Karena tanah yang tersedia sudah digunakan sebelum revolusi kependudukan, perubahan ini mulai memberikan

tekanan berat kepada kependudukan.

Tanah yang tersedia untuk per-usaha tani makin menurun dengan cepat. Sejauh ekonomi masih dikuasai oleh sektor pertanian, pergeseran ini berarti memburuknya kondisi untuk sebagian besar penduduk Jawa Tengah.

Berdasarkan Sensus Pertanian 1973 rata-rata pemilikan tanah untuk per-usaha tani saat ini 0,5 ha, jika petani padi saja yang dihitung angka ini akan lebih rendah lagi.

e. Usaha-usaha Pembangunan di masa lalu.

- S.012 Usaha-usaha pembangunan pemerintah sejak REPELITA I telah mempengaruhi struktur ekonomi bangsa demikian juga pada tingkat Propinsi. REPELITA I menekankan modernisasi ekonomi melalui import pengganti dan peningkatan unsur-unsur prasarana pokok.
- S.013 Di atas semuanya, pembangunan sektor pertanian mendapatkan prioritas tertinggi, hal ini diperlihatkan dengan adanya rehabilitasi sistim pengairan dan pengenalan program Bimas / Inmas, akibatnya terdapat kenaikan dalam produksi padi, dan ini dapat dijadikan mesin penggerak pertumbuhan yang dinamis.
- S.014 Suatu pengaruh yang tidak menyenangkan adalah pendapat umum masyarakat di Jawa Tengah, yaitu sampai dengan awal 1970 - an bahwa Jawa adalah daerah yang relatif lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah lain, ini benar menurut sejarah perkembangan kebudayaan. Tetapi di luar kota-kota utama di Jawa, pulau ini menderita parah akibat tekanan penduduk. Kemiskinan yang relatif di daerah pedesaan Jawa telah diakui oleh buku perkiraan pendapatan propinsi yang dibuat pada awal tahun 70-an. Dengan kata lain, alokasi sumber pembangunan selama awal tahun REPELITA I dibuat tanpa pengenalan yang jelas mengenai tanda-tanda kemiskinan yang ada di daerah pedesaan Jawa.
- S.015 Salah satu indikator daripada ketidak cukupan pengenalan tersebut di atas adalah perkapita penerimaan dan sumber-sumber pembangunan yang diterima dari pemerintah pusat. Selama REPELITA I Jawa Tengah menerima lebih kecil dari rata-rata Nasional perkapita dan lebih kecil dari Jawa Barat. Selama 4 tahun REPELITA I Jawa Tengah hanya menerima Rp 1.790,- perkapita atau kira-kira 54% dari rata-rata Nasional sebesar Rp 3.300,-. Untuk Jawa Timur dan Jawa Barat angka-angka tersebut adalah Rp 1.720,- dan Rp 2.615,- (dihitung dari tabel 1.14., halaman I - 32).
- S.016 Jika alokasi didasarkan pada potensi pembangunan, pertumbuhan penduduk dan faktor-faktor lainnya, maka tidak dapat segera disimpulkan bahwa Jawa Tengah tidak menerima bagian yang wajar. Tetapi adalah pasti betul jika Propinsi Jawa Tengah mendapat bagian yang lebih besar, maka perekonomiannya akan tumbuh ke tingkat yang lebih besar.

Sebagai tambahan, percobaan perhitungan ICOR menunjukkan bahwa output ratio Jawa Tengah adalah lebih kecil daripada output ratio nasional (lihat Bab XIII); hal ini menunjukkan bahwa produktivitas penanaman modal di Jawa Tengah tidak harus lebih rendah daripada rata-rata nasional dan bahkan mungkin lebih tinggi.

Karenanya, suatu alokasi sumber-sumber pembangunan yang sedikit lebih kecil dari rata-rata nasional untuk Jawa Tengah dari Pemerintah Pusat dapat dipertanggung jawabkan.

f. Pembangunan saat ini

S.017 Sejak awal REPELITA II, titik pembangunan bergerak ke arah tujuan redistribusi sebagai contoh untuk memperkecil jurang pembangunan antara daerah-daerah dan meratakan hasil pembangunan.

Sesuai dengan orientasi kebijaksanaan ini, pembangunan daerah pedesaan telah dijadikan pusat perhatian pemerintah.

Sejumlah proyek-proyek Inpres telah dilaksanakan dan dikembangkan dan sejumlah program-program baru lainnya telah dimulai untuk membantu penduduk yang lemah.

S.018 Jelas, Jawa Tengah akan menjadi salah satu penerima keuntungan dari kebijaksanaan ini. Akan tetapi ke arah mana program ini akan memperbaiki posisi Jawa Tengah belum jelas. Data-data statistik menunjukkan bahwa beberapa Kabupaten yang kurang berkembang di Jawa Tengah, menunjukkan adanya peningkatan produksi padi bersifat substantial (untuk memenuhi kebutuhan sendiri). Dapat ditambahkan, adanya perbaikan pengelolaan sistim pengairan di beberapa daerah utama penghasil padi, sedang dilaksanakan.

S.019 Di bidang industri pengolahan, sejumlah pabrik dengan ukuran substantial (sekecil memenuhi kebutuhan) telah dapat diselesaikan dan telah mulai bekerja di daerah Semarang dan sekitarnya. Pembangunan baru telah dimulai di beberapa daerah seperti Tegal, Klaten, Surakarta dan Kudus.

S.020 Di atas semua itu, Cilacap mempunyai arti yang penting dan meningkat dengan mantap, sejak diperuntukkan sebagai suatu pusat pertumbuhan nasional. Karena Cilacap diharapkan untuk melayani Propinsi Jawa Tengah keseluruhan dan bagian-bagian sebelah Timur Jawa Barat, sebagai satu-satunya pintu masuk ke Pulau Jawa dari Samudera Indonesia, pelabuhannya telah diperbaiki, Industrial estate (kawasan industri) dibangun dan usaha-usaha sedang dilakukan untuk memikat pembangunan industri.

S.021 Pada waktu yang sama, hambatan-hambatan terhadap pembangunan Jawa Tengah masih cukup banyak. Tekanan penduduk masih ada. Tidak ada sesuatu sumber-sumber alam yang menguntungkan seperti minyak

mentah atau gas alam. Cilacap masih jauh dari tahap "take off". Semarang sedang menderita akibat keadaan pelabuhannya yang buruk. (lihat seksi 6.3.9. (a) dan (b)).

S.022 Berbagai indikator-indikator ekonomi menunjukkan bahwa ekonomi Jawa Tengah sedang mengarah kepada suatu keseimbangan. Dipandang dari sudut pertumbuhan Produk Domestic Daerah Bruto (GRDP) per sektor, tidak didapati pertumbuhan sektor yang pesat diantara sektor-sektor yang secara langsung produktif. Hanya sektor-sektor pelayanan / jasa yang relatif bertumbuh dengan pesat (lihat daftar 1.18, halaman 1 - 41). Dalam hal ruang lingkup penyebaran kegiatan, ada suatu indikasi yang jelas bahwa variasi-variasi harga menurut geografis adalah menurun (lihat Bab V, halaman V - 12). Pengamatan-pengamatan ini akan membayangkan bahwa bagian-bagian yang berbeda dari Propinsi Jawa Tengah akan saling mempengaruhi lebih bebas daripada sebelumnya, dengan adanya perbaikan dalam pengangkutan dan kegiatan-kegiatan perdagangan. Akan tetapi pengamatan ini juga membayangkan bahwa Propinsi Jawa Tengah kekurangan mesin-mesin untuk pertumbuhan yang dinamis. Diantara berbagai sektor, hanya angkutan udara yang diarahkan untuk pariwisata nampaknya akan berkembang dengan pesat.

S.023 Jumlah arus penduduk yang keluar Propinsi Jawa Tengah adalah tetap. Dari Jawa Tengah banyak penduduk biasanya pergi ke luar Pulau Jawa sebagai transmigran, tetapi baru-baru ini penyediaan tempat di luar Pulau Jawa sedang menurun sebagai akibat kejebuhan daerah secara relatif. Oleh karena itu sebagian besar imigrasi telah mulai bergerak ke Jakarta, pada tahun 1971 jumlahnya diperkirakan lebih dari 35.000 (lihat paragraph A.20). Tetapi kemampuan Jakarta untuk menampung imigrasi bukanlah tidak terbatas. Ada suatu peningkatan keinginan untuk menemukan suatu pemecahan di dalam Propinsi Jawa Tengah itu sendiri. Satu jalan yang nyata adalah Keluarga Berencana.

g. Penyebaran kegiatan-kegiatan secara geografis.

S.024 Melalui penyajian penyebaran pola kegiatan menurut geografis di Jawa Tengah, daerah geografis berikut telah diidentifikasi.

(i). Semarang : Pusat Pengembangan.

S.025 Meskipun daerah-daerah Jawa Tengah kurang dalam hal keterikatannya bila dibandingkan dengan Jawa Timur, namun suda ada suatu pemerintahan yang pasti, pusat perdagangan dan perindustrian, yaitu di Semarang sebagai ibukota Propinsi. Walaupun penduduknya dibawah 800.000 orang, Semarang mendominir semua pusat-pusat kegiatan di Jawa Tengah dan sedang berkembang dengan mantap. Tidak ada kotamadya lain dapat menyaingi Semarang walaupun dalam tingkat

pertumbuhan. Dilihat dari sudut investasi proyek-proyek swasta yang disetujui, 44 persen swasta asing dan 49 persen proyek investasi dalam negeri dari tahun 1969 sampai 1974 dilokasikan di Semarang (lihat daftar 6.12, bab VI-28).¹⁾ Dalam kegiatan perdagangan, 70 % pedagang-pedagang besar bertempat di Semarang (lihat bab V, halaman V-5).

(ii). Sabuk Pengembangan (Development Belt).

S.026 Gambaran geografis lainnya yang dominan adalah adanya sabuk pengembangan sepanjang jalan negara dari Brebes, Tegal, Pekalongan melalui Semarang, Salatiga ke Surakarta dan ke Timur. Di sebelah Selatan Semarang, sabuk ini mempunyai dua taji arah ke Yogyakarta melalui Magelang dan melalui Klaten. Sabuk batas ini bersamaan dengan route utama Jawa yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya, tapi juga melalui daerah produksi pertanian, yang utama yang terletak sepanjang pantai sebelah Utara dan lembah Bengawan Solo bagian hulu.

S.027 Sabuk batas pengembangan ini mempunyai pusat pengembangan Propinsi dengan pusatnya Semarang, tetapi juga mempunyai sejumlah pusat-pusat pertumbuhan sekunder yang sedang bertumbuh dengan dasar industri pengolahan dan perdagangan. Pusat-pusat pertumbuhan sekunder itu adalah :

- (1) Tegal : industri pengolahan logam (lihat seksi 6.4.9.), perdagangan.
- (2) Pekalongan : industri pengolahan tekstil, perdagangan.
- (3) Salatiga : industri-industri pertanian.
- (4) Surakarta : industri pengolahan rokok, industri pengolahan tekstil, pariwisata.
- (5) Magelang : industri pertanian, pariwisata; dan
- (6) Klaten : pengolahan logam dasar. (lihat seksi 6.4.9.).

(iii). Pusat-pusat pertumbuhan yang terisolir.

S.028 Sebagai tambahan, ada pusat pertumbuhan yang terisolir, yaitu :

- (1) Cilacap, Banyumas dan
- (2) Kudus.

Daerah Cilacap - Banyumas adalah daerah yang kaya pertanian di lembah kali Serayu. Tetapi kenyataan ini, juga karena peruntukan Cilacap sebagai suatu pusat pertumbuhan nasional. Pertanian dan lain-lain perusahaan telah melakukan investasi yang layak di daerah ini.

Disamping itu, Banyumas akan dapat men-supply (menyediakan) hasil-hasil hutan untuk dikapalkan melalui pelabuhan Cilacap.

Meskipun pertumbuhannya belum dijamin, ada prospek yang baik untuk pertumbuhan bila persiapan-persiapan yang penting dilengkapi.

¹⁾ Cilacap mendominasi dalam hal investasi modal asing. Sampai akhir 1976 52% dari investasi yang disetujui, terletak di Cilacap dan sekitarnya. Meskipun demikian, dalam hal jumlah proyek-proyek Semarang memegang andil 44% pada waktu tersebut.

S.029 Kudus yang terletak di sebelah Timur Semarang, adalah pusat daerah pertanian yang subur, akan tetapi kemungkinan pengembangannya berasal dari kegiatan pabrik rokok kretek dan digabungkan dengan kegiatan percetakan. Permintaan akan rokok kretek sedang meningkat dengan mantap dan hubungannya dengan itu, industri percetakan sedang bertumbuh. Ada kemungkinan baik bahwa industri percetakan akan bertumbuh tidak tergantung dari produksi rokok. Pertumbuhan daerah ini lebih jauh akan dipercepat oleh pengembangan sumber-sumber air yang mengancam daerah antara Semarang dan Kudus.

(iv). Daerah Minus

S.030 Dari daerah-daerah lainnya, beberapa daerah tertinggal daripada yang lain. Bila daerah itu disebut : "daerah minus" ada dua blok yang besar dan satu blok yang kecil. Satu blok yang besar adalah daerah dataran tinggi yang berasal dari Temanggung sampai gunung Slamet dan blok besar lain adalah bagian paling Timur Jawa Tengah yang terdiri dari Rembang, Blora dan Purwodadi. Yang ketiga dan blok kecil adalah bagian paling Tenggara Jawa Tengah terutama di Wonogiri, perbatasan Jawa Timur dan Yogyakarta.

(v). Daerah Sedang (Intermediate Areas)

S.031 Daerah selain daerah minus yang disebutkan di atas disebut daerah sedang (intermediate areas) dan daerah ini menggambarkan ciri-ciri khas propinsi, yang dilukiskan dalam setengah bagian pertama dari Bagian S.1.1.

h. Tinjauan potensi pembangunan sektoral

S.032 Dari sektor-sektor produktif yang pokok, pertanian adalah yang paling dominan dalam hal jumlah pekerja yang ditampung. Di sektor pertanian, kurangnya tanah telah mengarahkan penduduk untuk mengintensifkan penggunaan tanah melalui tanaman ganda dengan pemupukan berat. Dalam sektor pertanian, ada sejumlah program seperti program BIMAS / INMAS yang pada saat ini sedang berjalan dan menggerakkan pembangunan sektor pertanian. Prospek pembangunan sektor pertanian dapat dibahas dengan membaginya dalam dua bagian yaitu : padi dan tanaman-tanaman lain.

S.033 Produksi padi terutama sekali telah menarik perhatian para pembuat kebijaksanaan di negeri ini. Program-program yang ada saat ini yang telah mereka rencanakan tidak diragukan lagi sumbangannya dalam peningkatan produksi padi. Akan tetapi hambatan utama untuk peningkatan lebih lanjut adalah keterbatasan tanah-tanah yang bisa diairi. Ada sejumlah studi yang pada saat ini sedang dibuat untuk tujuan peningkatan daerah pengairan, tetapi perluasan seperti ini tidak secepat waktu dan sumber-sumber yang dibutuhkan. Walaupun demikian

pembuatan rencana pekerjaan irigasi utama, tertier dan fasilitas terminal dan kecepatan perkembangan yang pantas dapat diharapkan.

- S.034 Untuk tanaman-tanaman yang lain selain padi, tanaman dataran tinggi adalah merupakan type utama daripadanya. Pada saat ini tanaman dataran tinggi sangat terbatas kepada jagung dan ubi kayu. Akan tetapi diversifikasi dari tanaman dataran tinggi akan diperlukan jika pendapatan petani dataran tinggi meningkat. Tanaman-tanaman baru akan menguntungkan jika diperkenalkan atau ditanam di daerah yang lebih luas yaitu kedele, kacang tanah, sayuran dan bunga matahari. Namun demikian sejumlah masalah yang perlu diperluas sebelumnya adalah bagaimana menjadikan tanaman-tanaman itu sebagai pendapatan tambahan. Peternakan adalah merupakan sektor lain yang mempunyai prospek di daerah non padi. Untuk suatu pengembangan yang berhasil di daerah pertanian dataran tinggi dan daerah produksi ternak, strategi pengembangan daerah pedesaan yang komprehensif termasuk pengembangan prasarana pokok, pelayanan penyuluhan, kredit dan organisasi-organisasi pemasaran, akan dibutuhkan.
- S.035 Di bidang pertambangan dan industri pengolahan ada beberapa kemungkinan baik. Walaupun sebagian besar industri kecil dan industri rumah tangga mungkin tidak dapat dikembangkan, beberapa industri pengolahan makanan dapat terus hidup dengan menggunakan mekanisme yang terpilih dalam proses produksinya.
- S.036 Industri-industri yang mempunyai harapan yang baik adalah industri pengolahan logam, kimia, karet dan industri-industri plastik. Industri-industri tersebut dalam beberapa tingkatan berorientasi pada pengelompokan, lokasi-lokasi yang potensiil dari industri ini sangat terbatas pada pusat pengembangan (Semarang) dan Sabuk pengembangannya.
Banyak pertumbuhan baru dalam pengolahan logam, akan diserap oleh Tegal dan Klaten dan sisanya kebanyakan di sekitar Semarang. Akan tetapi industri petrokimia akan ditempatkan di Cilacap sebagai pelabuhan pemasukan minyak mentak ke seluruh daerah.
- S.037 Salah satu dari sektor khusus yang mempunyai harapan adalah pariwisata dimana Jawa Tengah dianugerahi kekayaan sumber-sumber pariwisata. Meskipun adanya Borobudur yang terkenal di Propinsi ini kebanyakan turis pada saat ini datang dan tinggal di Yogyakarta untuk mengunjungi candi tersebut. Kecenderungan ini tidak dengan mudah dapat dirobah, tetapi ada kecenderungan yang jelas bahwa jumlah turis udara ke Semarang meningkat dengan cepat.
Karenanya, pendirian suatu daerah tujuan wisata yang luas, international dan domestik dari Yogyakarta ke Semarang akan merangsang pengembangan tourisme di Jawa Tengah dan menyumbangkan materi untuk pengembangan ekonomi secara keseluruhan.

S.038 Pembangunan industri telah dibantu oleh meningkatnya pelaksanaan proyek pekerjaan umum dan berbagai program Inpres. Bukti yang ada menunjukkan bahwa proyek-proyek tersebut menolong mempersempit jurang pembangunan suatu daerah perkotaan dan pedesaan.

S.1.2 ALTERNATIF STRATEGI PEMBANGUNAN

a. U m u m

S.039 Alternatif strategi pembangunan dapat dipahami dengan melihat kepada alokasi sumber dalam propinsi dan antar propinsi. Bentuk yang pertama berlandaskan kepada alternatif alokasi sumber-sumber yang ada di propinsi dan bentuk berikutnya berlandaskan kepada alternatif alokasi sumber antar propinsi Jawa Tengah dan daerah-daerah lain di Indonesia. Dalam bentuk pertama, penekanan analisa team studi diberikan kepada penyebaran geografis dari alokasi sumber-sumber dan juga menggunakan alokasi sumber sektoral. Tambahan pula alokasi sumber antar propinsi dalam studi ini memperhatikan strategi yang mencoba merubah pertumbuhan penduduk itu sendiri.

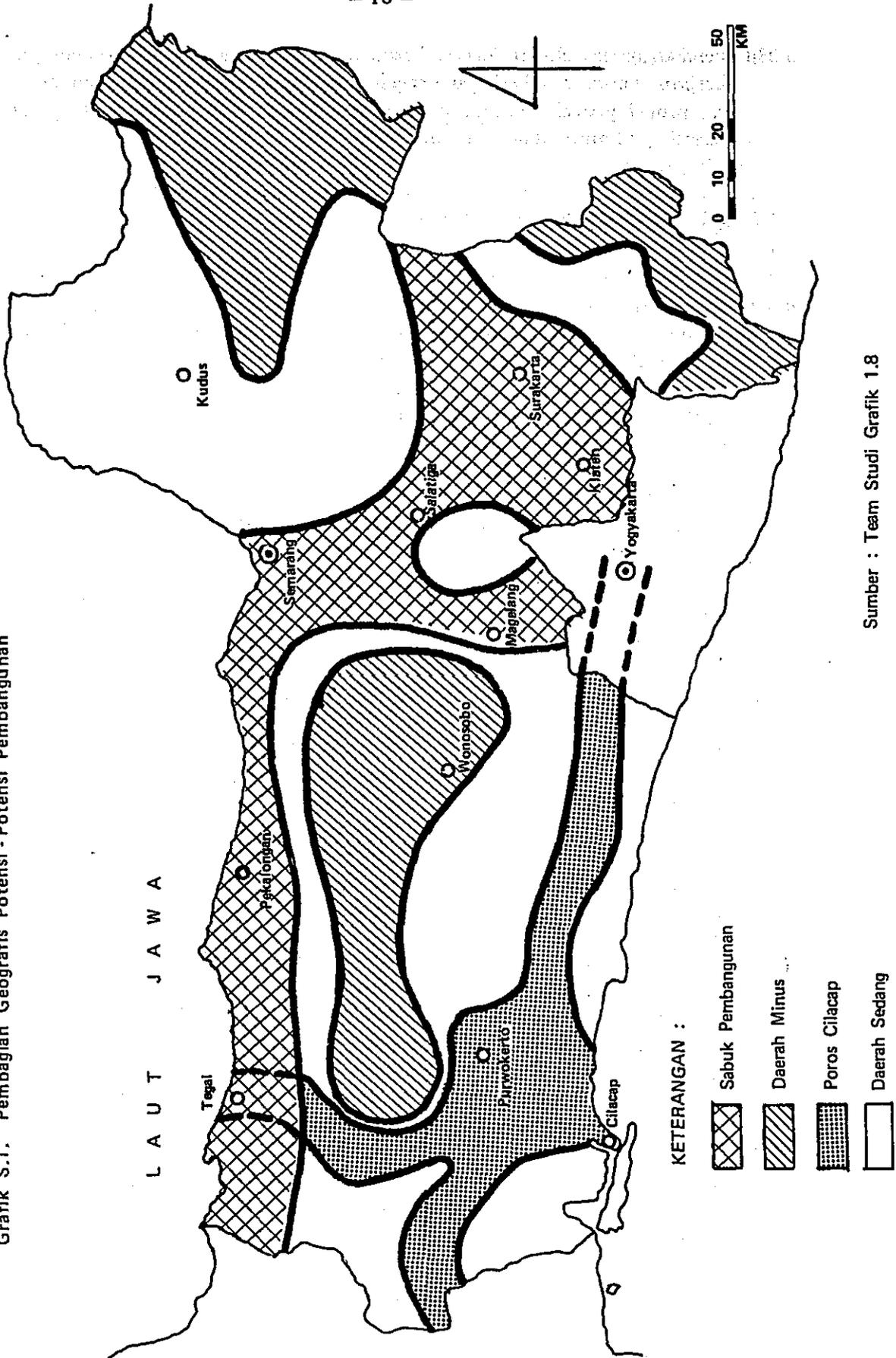
b. Alternatif-alternatif sehubungan dengan alokasi sumber-sumber dalam propinsi.

(i). Strategi pembangunan yang tidak seimbang

S.040 Seperti dijelaskan di atas, ada Sabuk pembangunan (lihat grafik S.1). Sabuk pembangunan ini akan berlanjut ke daerah yang mempunyai potensi pengembangan yang tertinggi. Pertama : Semarang sebagai pusatnya, merupakan motor utama yang akan menyokong pertumbuhan daripada sabuk pembangunan ini. Disamping itu, produksi padi telah meningkat dengan nyata di daerah lembah kali Pemali Comal sebagai hasil dari perbaikan sistim irigasi. Di dalam daerah ini Tegal mempunyai pengembangan yang baik khususnya sebagai pusat pengolahan industri logam yang akan melengkapi pengembangan pertanian melalui pengadaan dan perbaikan mesin pertanian.

S.041 Semarang dapat merupakan pendorong pembangunan yang kuat jika pelabuhannya diperbaiki seperti apa yang telah direncanakan. Selanjutnya jika perbaikan yang telah dilaksanakan di kota ini untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatan industri yang besar bersamaan dengan perluasan kapasitas pelabuhan, pertumbuhan ekonomi yang cepat di kota ini praktis terjamin. Kota ini dapat menyesuaikan berbagai kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan ke-aneka-ragaman alamiahnya. Keadaan ini akan berlanjut kepada pusat pemerintahan dan pusat kebudayaan di propinsi ini, demikian pula pusat pengolahan industri dan perdagangan. Pengembangan Semarang selanjutnya akan dirangsang oleh pengembangan sumber-sumber air, terutama pengendalian banjir dan saluran air di sebelah Timur kota ke arah Kudus.

Grafik S.1. Pembagian Geografis Potensi - Potensi Pembangunan



Sumber : Team Studi Grafik 1.8

- S.042. K arah Selatan Semarang, Salatiga dan Magelang akan dapat menerima keuntungan dengan nyata untuk pusat-pusat pemasaran dan perdagangan dan produksi tanaman dataran tinggi. Kota-kota ini akan sanggup menjadi pusat pengolahan hasil pertanian.
- S.043 Surakarta akan sanggup berkembang menjadi basis industri tekstil dan industri padat karya lainnya. Ciri-ciri perkotaan dari kota ini akan menjadi daya penarik investor-investor baru.
Bila proyek serbaguna Bengawan Solo selesai, akan mempunyai pengaruh yang menguntungkan bagi intensifikasi pertanian dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan itu. Demikian pula Surakarta akan merupakan bagian yang penting sebagai daerah kepariwisataan termasuk Yogyakarta dan Semarang.
- S.044 Klaten akan menjadi pusat industri khusus lainnya untuk pengolahan logam. Pengetahuan dasar sudah ada disana. Dorongan lebih lanjut dari pemerintah akan meningkatkan prospek yang besar ini.
- S.045 Alternatif strategi pembangunan ini secara ekonomi akan lebih efisien jika dibandingkan dengan beberapa alternatif lainnya, misalnya pertumbuhan ekonomi yang terbesar dapat dicapai dengan memberikan jumlah investasi yang besar kepada sumber-sumber alam.
Unsur utama dari investasi Pemerintah diperlukan untuk strategi ini adalah sebagai berikut :
1. Upgrading yang memadai di jalan negara sepanjang pantai Utara dan Brebes ke Semarang dan Selatan ke Surakarta dan ke Timur dan jalan negara lainnya melalui Magelang dan Klaten menuju Yogyakarta.
 2. Pengembangan pelabuhan Semarang dengan membangun kembali daerah-daerah yang tertentu di kota tersebut termasuk Semarang Barat dan Timur untuk pembangunan kawasan industri.
 3. Pembangunan kawasan industri di Tegal, Pekalongan, Magelang, Salatiga dan Klaten dengan penyediaan ketenagaan dan pusat latihan tenaga kerja, serta dengan perbaikan sistim telekomunikasi untuk kota-kota tersebut. Schedule yang wajar dari kawasan ini adalah penting.
 4. Memperkuat pelayanan pengembangan industri pada kota-kota ini.
 5. Rehabilitasi irigasi dan perbaikan saluran air/pengendalian banjir di aliran Pemali Comal.
 6. Pembangunan penyimpanan air dan perbaikan saluran air untuk daerah Semarang, Demak, Kudus, dikombinasikan dengan pengembangan industri di Kudus dan penyediaan air yang dapat diminum di daerah itu.
 7. Pengembangan tanah peruntukan perumahan dan perbaikan fasilitas lingkungan yang ada di pusat-pusat perkotaan.
- S.046 Kemungkinan pengaruh yang berlawanan dari strategi ini adalah meluasnya jurang pembangunan antara sabuk pembangunan daerah-daerah lain dari propinsi. Adalah mungkin untuk membuat beberapa kritik yang menarik dalam hal ini.

S.047 Pertama, informasi yang ada mengenai pergerakan penduduk menunjukkan bahwa penduduk di Propinsi ini cukup bergerak. Telah diketahui dengan baik bahwa beberapa penduduk pindah secara spontan sampai ke Sumatera dan Kalimantan dan banyak pula yang tertarik ke Jakarta karena keuntungan-keuntungan ekonomi (lihat seksi 2.2.3.). Karenanya jika ada informasi, maka akan banyak penduduk bersedia pindah / ber-imigrasi ke salah satu dari pusat-pusat pengembangan itu. Sebagai tambahan karena bentuk dari sabuk pembangunan tersebut, tidak akan ada wilayah di propinsi Jawa Tengah yang berjarak lebih dari 150 km dari sabuk pembangunan.

S.048 Kedua, informasi dapat secara sistimatis diberikan kepada penduduk di daerah hinterlandnya dalam hal tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan mendapatkan latihan. Disamping itu, persiapan fasilitas penerimaan imigran itu, akan menghilangkan hambatan-hambatan untuk ber-migrasi.

(ii). Strategi untuk Daerah Minus.

S.049 Tujuan dari strategi ini adalah untuk memperbaiki / meningkatkan taraf hidup penduduk pedesaan yang berpenghasilan rendah, dengan titik berat pada daerah-daerah minus, langsung melalui penanganan secara menyeluruh pada sumber kemiskinan.

Bila berhasil, strategi ini akan dapat memecahkan salah satu tujuan utama dari REPELITA II, seperti misalnya tujuan redistribusi.

S.050 Daerah-daerah minus di Jawa Tengah dapat dibagi dalam 2 kelompok. Sejauh studi ini menyangkut wilayah rantai pegunungan mulai dari Gunung Ungaran sampai dengan Gunung Slamet, sukarnya pemasaran serta kurangnya pengetahuan mengenai jenis tanaman yang cocok untuk daerah-daerah tersebut merupakan sebab utama dari terbelakangnya daerah tersebut. Oleh karena itu, bila perbaikan jalan raya dikombinasikan dengan perluasan jasa-jasa yang sesuai serta pengembangan sistim pemasaran, maka daerah tersebut akan dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar.

Secara khusus suatu paket pembangunan pedesaan akan mencakup elemen-elemen sebagai berikut :

- (1) Perbaikan jalan raya yang menghubungkan daerah-daerah pedesaan dengan kota-kota yang menjadi pusat / pasar bagi daerah-daerah tersebut (market towns) seperti misalnya pusat-pusat Kabupaten.
- (2) Penyediaan jasa-jasa pertanian yang luas dengan titik berat pada pertanian tanaman seperti kacang tanah dan kedele dikombinasikan dengan peternakan unggas dan sapi.
- (3) Organisasi yang efektif dan sistim pemasaran yang efisien.
- (4) Bila mungkin, pengusahaan fasilitas produksi pertanian dengan melalui usaha koperasi.

S.051 Prospek dari macam pembangunan untuk daerah-daerah dataran tinggi ini tidaklah begitu meyakinkan. Pertama-tama, investasi yang dibutuhkan untuk setiap unit tambahan di dalam nilai tambahan pada umumnya tinggi. Hal ini disebabkan tidak hanya untuk investasi modal saja tetapi juga untuk tenaga ahli. Organisasi serta perbaikan-perbaikan sistim pemasaran akan membutuhkan sejumlah besar tenaga ahli karena jumlah penduduk yang harus ditangani adalah sangat besar.

Kedua, terdapat sejumlah ketidakpastian yang belum berhasil diselesaikan sehubungan dengan metode pembangunan pedesaan.

Meskipun program-program pertanian telah ter-uji dengan baik di daerah-daerah utama penghasil beras, tetapi program-program yang sama untuk daerah-daerah dataran tinggi yang jarang penduduknya belum terbukti berhasil atau tidaknya. Apa yang dapat direkomendasikan pada saat ini adalah memulai skema percobaan dimana prospek pembangunan yang baik telah diketahui untuk dilaksanakan.

S.052 Daerah-daerah minus yang terletak di sebelah Timur berbeda dengan daerah-daerah dataran tinggi tersebut di atas. Masalah utama disini adalah persediaan air yang tidak tetap serta ciri-ciri tanah yang tidak subur. Meskipun hubungan pemasaran juga buruk, perbaikannya tidak akan menolong pembangunan di daerah itu. Daerah tersebut membutuhkan ukuran-ukuran pengelolaan air secara luas serta peningkatan kualitas tanah. Sebagaimana dinyatakan di atas, daerah ini kurang memberikan harapan dibandingkan dengan wilayah dataran tinggi. Setiap usaha yang sungguh-sungguh untuk pengembangan haruslah berdasarkan pada penelitian atau pengujian yang teliti mengenai potensi yang dimilikinya.

(iii). Strategi Pembangunan Daerah Poros Cilacap

S.053 Daerah Cilacap telah direncanakan sebagai pusat pertumbuhan pada tingkat nasional. Akan tetapi, kecuali potensi pelabuhannya, pertumbuhan kota industri ini lamban. Meskipun demikian, keuntungan potensiil daripada pembangunan daerah Cilacap adalah besar.

Pertama-tama, wilayah sebelah Selatan Pulau Jawa akan mempunyai harapan untuk berkembang mengingat Cilacap merupakan satu-satunya kota utama di sepanjang pantai Selatan yang pada umumnya sangat terbelakang dibandingkan wilayah sebelah Utara Pulau Jawa.

Kedua, pembangunannya akan dapat mengatasi hambatan yang menjadi sebab terbelakangnya Jawa Tengah, seperti misalnya tidak adanya pelabuhan yang setingkat dengan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Dengan demikian, bila pusat pertumbuhan Cilacap berhasil di dalam mencapai tujuan pembangunannya, maka Propinsi Jawa Tengah akan dapat berkembang setingkat dengan Jawa Barat dan Jawa Timur.

Ketiga, pembangunannya berarti munculnya suatu pusat pembangunan tandingan dari jalur pembangunan yang ada sekarang di Propinsi tersebut. Sebagai akibatnya, hubungan ke pusat pembangunan di Propinsi tersebut akan mengalami perbaikan besar-besaran.

- S.054 Kemajuan pembangunan daerah Cilacap yang lamban, pertama-tama sehubungan dengan lambannya pembangunan prasarana dan selanjutnya sehubungan dengan kurangnya aktivitas perkotaan dimana aktivitas industri baru seharusnya dapat ditambahkan. Pembangunan prasarana sedang dilaksanakan di Cilacap. Jalur transmisi akan segera disalurkan, akan tetapi pembangunan prasarana lainnya seperti air minum dan telekomunikasi masih kurang meyakinkan.
- S.055 Tindakan penting lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan daerah Cilacap adalah perbaikan jalan ke dan dari daerah-daerah lainnya. Pada dewasa ini jalan kereta api dan jalan raya yang ada dalam keadaan buruk. Direktorat Jenderal Bina Marga sedang mengerjakan peningkatan jalan raya dari Bandung ke Purworejo melalui Wangon serta jalan penghubung antara Cilacap dan Wangon. Jika perbaikan ini telah selesai, prospek pembangunan Cilacap akan lebih baik. Perbaikan jalan raya mempunyai dua aspek sekaligus yaitu : memperbaiki prasarana yang dibutuhkan, dan melengkapi aktivitas perkotaan yang mendukungnya yang saat ini di Cilacap sendiri masih sangat kurang dan diselenggarakan oleh mereka yang tinggal di kota-kota sekitarnya seperti Purwokerto.
- S.056 Ide perbaikan hubungan dari Cilacap ke arah Timur dan Barat dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan langkah yang harus dibenarkan untuk pembangunan daerah Cilacap, akan tetapi hal itu saja tidak cukup untuk pembangunan pusat pertumbuhan secara cepat. Hubungan Utara - Selatan menuju Tegal juga akan diperbaiki. Jalan raya yang panjangnya kurang dari 150 km ini akan menghubungkan Cilacap dengan jalur pembangunan di sebelah Utara yang sedang tumbuh secara lebih efektif. Jalan penghubung ini merupakan yang paling efisien yang menghubungkan Cilacap dengan kota yang lebih besar, oleh karena itu akan mendapat prioritas utama.
- S.057 Tindakan yang perlu dilakukan untuk pembangunan Cilacap dan poros adalah sebagai berikut :
- (1) penyediaan tenaga yang dapat dipercaya.
 - (2) penyediaan air untuk industri.
 - (3) penyediaan tanah yang luas untuk industri dan dengan kapasitas yang lebih besar. (lihat seksi 6.3.9.(a).).
 - (4) peningkatan jalan raya langsung ke Utara menuju Tegal, Bandung terus ke arah Barat dan ke Yogyakarta terus ke Timur. Jalan Penghubung yang baru antara Purworejo dan Yogyakarta akan dibutuhkan.
 - (5) koordinasi antar instansi untuk pelaksanaan program-program pembangunan.
 - (6) bantuan tehnik dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Propinsi dan Kabupaten.

(iv). Strategi Kependudukan

S.058 Strategi ini terdiri dari 2 elemen, yaitu, pertama bertujuan mengurangi jumlah penduduk Jawa Tengah dengan cara menggalakkan transmigrasi ke pulau-pulau di luar Jawa.

Secara historis, program-program transmigrasi telah dilaksanakan dengan bantuan Pemerintah. Akan tetapi, sehubungan dengan kebutuhan sumber-sumber yang sangat luas (menurut perkiraan Bank Dunia US \$ 4,700 per keluarga), laju transmigrasi masih jauh dibawah laju pertumbuhan alamiah penduduk. Oleh sebab itu, serangkaian tindakan-tindakan yang mungkin adalah meningkatkan proyek-proyek transmigrasi secara besar-besaran ke Luar Jawa sehingga pengurangan jumlah penduduk secara mantap dapat dilaksanakan.

S.059 Unsur lainnya di dalam strategi tersebut adalah memantapkan program Keluarga Berencana.

Meskipun laju pertumbuhan alamiah penduduk mulai menurun pada tahun tujuh puluhan, akan terdapat kenaikan di dalam laju pertumbuhan selama tahun delapan puluhan sehubungan dengan terdapatnya peledakan kelahiran selama tahun lima puluhan dan enam puluhan.

Jika tidak diambil tindakan cepat sebagaimana yang dilakukan sekarang, maka jumlah penduduk Propinsi Jawa Tengah maupun Indonesia secara keseluruhan akan berlipat ganda. Begitu jumlah penduduk mencapai jumlah yang sangat besar, maka masalah yang dihadapi sekarang akan menjadi parah di masa depan.

c. Alternatif-alternatif sehubungan dengan alokasi sumber-sumber antar propinsi.

S.060 Perkiraan-perkiraan pendapatan propinsi yang tersedia menunjukkan bahwa tingkat pendapatan per kapita Jawa Tengah relatif menurun dari rata-rata nasional pada suatu periode tertentu, kira-kira sekitar 55 % pada tahun 1975 (lihat tabel 1.10).

Meluasnya perbedaan pendapatan antar propinsi adalah bertentangan dengan tujuan REPELITA I dan REPELITA II. REPELITA II terutama menekankan pencapaian distribusi yang merata dari hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu pilihan yang dibuat dalam bagian ini dihubungkan dengan penyamaan tingkat pendapatan yang akan dicapai pada akhir REPELITA III antara Jawa Tengah dan Nasional.

Tingkat kesamaan dan perbedaan sangat tergantung pada sumber-sumber pembangunan yang akan dialokasikan di Jawa Tengah.

Ada dua pilihan yang dipertimbangkan :

- (1) Mempertahankan tingkat perbedaan yang ada saat ini, yaitu per kapita pendapatan Jawa Tengah 55 % dari tingkat rata-rata nasional, atau
- (2) Mengurangi perbedaan itu dengan menaikkan pendapatan per kapita Jawa Tengah menjadi 65 % dari tingkat rata-rata nasional.

S.061 Pada umumnya, suatu tingkat pendapatan yang lebih tinggi hanya dapat dicapai dengan meningkatkan alokasi sumber-sumber pembangunan ke Jawa Tengah. Alternatif kedua lebih diarahkan untuk Jawa Tengah, tetapi tersedianya sumber-sumber tersebut ditentukan oleh kelayakannya.

S.1.3. REKOMENDASI STRATEGI PEMBANGUNAN.

a. Tersedianya sumber-sumber untuk pembangunan.

S.062 Sumber-sumber pembangunan yang tersedia di Jawa Tengah dapat di proyeksi dalam dua cara : Pilihan I dan Pilihan II.

Pilihan I ditentukan oleh keadaan dimana pendapatan per kapita di Jawa Tengah akan dipertahankan pada tingkat 55 % dari rata-rata nasional. Sebaliknya pilihan II adalah meningkatkan pendapatan per kapita kepada tingkat 65 % pada akhir REPELITA III. ²⁾

Pilihan II akan menekan jumlah sumber-sumber pembangunan 29 % lebih besar dari pilihan I selama periode 6 tahun yaitu sejak 1978/1979 sampai 1983/1984. Disamping itu kami akan menguji alternatif sumber-sumber dasar yang dihasilkan melalui ekstrapolasi sumber yang tersedia dari kecenderungan pada masa lalu ke masa yang akan datang. Pilihan I memerlukan investasi pemerintah sampai dengan tahun 1993 28,4 % lebih besar dari yang diperlukan alternatif sumber dasar dan pilihan II memerlukan 65,6 % lebih besar.

b. Penilaian banding atas strategi pilihan.

S.063 Untuk menentukan akibat yang timbul dari setiap strategi pembangunan telah dibuat beberapa asumsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Untuk setiap strategi, per kapita, investasi pemerintah di daerah strategi adalah dua kali lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Propinsi. Daerah strategi adalah daerah yang telah mendapat tekanan untuk pembangunan dalam setiap pilihan.
2. Investasi swasta yang akan dibuat merupakan perbandingan yang tetap dengan investasi pemerintah dan perbandingan ini perbedaannya tergantung pada potensi pembangunan dari daerah-daerah tertentu.
3. Susunan sektoral dari investasi pemerintah di masa yang akan datang adalah identik dengan susunan yang ada sekarang. Hasil yang diharapkan dari investasi ini ditentukan oleh sektor dimana investasi itu dilakukan dan tidak tergantung pada lokasinya.
4. Di-assumsi-kan bahwa Keluarga Berencana dan program transmigrasi dalam strategi kependudukan akan mengurangi penduduk Jawa Tengah dengan 662.000 orang sampai tahun 1983.

S.064 Akibat-akibat yang diramalkan dari setiap strategi pembangunan disimpulkan dalam grafik S.2 dan S.3. Di situ juga dapat dilihat strategi pertumbuhan yang

²⁾ Taksiran tingkat pendapatan per kapita tergantung pada strategi pembangunan yang digunakan. Perkiraan yang dibuat berdasarkan pada konvensional daripada alokasi sumber-sumber di propinsi.

tidak seimbang, memungkinkan Jawa Tengah tumbuh dengan cepat, tetapi perbedaan-perbedaan antara daerah minus dengan Propinsi secara keseluruhan akan bertambah. Di lain pihak strategi daerah-daerah minus akan memperbaiki status daerah minus secara drastis, tetapi pertumbuhan yang tidak seimbang diambil pilihan II yang dipakai, tingkat pertumbuhan per kapita propinsi akan melebihi 65 % dari rata-rata nasional. Disamping itu dengan alternatif sumber dasar, tingkat GRDP per kapita Jawa Tengah relatif akan merosot dibandingkan dengan rata-rata nasional. Hanya dengan menggunakan strategi pengembangan tak seimbang, tingkat ini dapat dipertahankan pada 53 % tahun 1983.

c. Strategi Pembangunan yang direkomendasikan.

S.065 Dengan mempertimbangkan akibat yang diramalkan seperti yang dijelaskan diatas, kami mengusulkan strategi campuran, yang disebut "Revised Mixed Strategy", yaitu :

1. Jumlah sumber-sumber pembangunan yang diperlukan adalah tingkat yang ditunjukkan oleh Pilihan I.
2. Strategi pertumbuhan yang tidak seimbang dan strategi daerah minus dicampur dalam suatu perbandingan 2 : 1.
3. Keluarga Berencana dan program transmigrasi dalam strategi kependudukan termasuk di dalamnya.
4. Strategi pengembangan poros Cilacap secara keseluruhan tidak termasuk tetapi Cilacap dan lingkungan di bawah pengaruh langsungnya diberikan tekanan pembangunan.

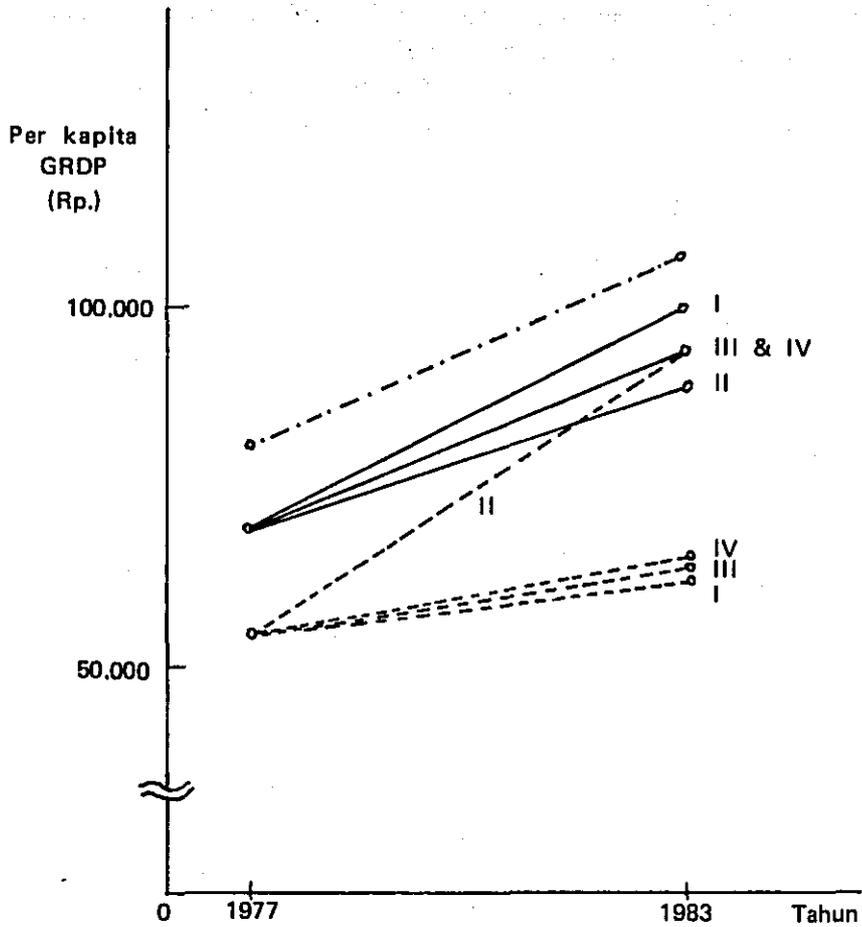
S.066 Akibat-akibat yang mungkin terjadi dari strategi ini dilihat pada gambar S.4. Dengan strategi ini pendapatan per kapita akan meningkat hampir pada tingkat 60 % sampai dengan tahun 1983 dan tingkat pendapatan pada daerah minus akan meningkat lebih besar daripada rata-rata nasional. Unsur-unsur pokok dalam strategi kependudukan dimasukkan karena pengaruhnya yang menguntungkan dalam jangka panjang dalam setiap tahunnya, tetapi tidak dapat terwujud dalam beberapa tahun.

Strategi pengembangan poros Cilacap dikurangi sampai batas minimumnya. Pembangunan Cilacap itu sendiri harus dilanjutkan, karena sejumlah industri yang memadai sudah ada atau sudah disetujui.

S.067 Tabel S.1 dan S.2 menunjukkan program investasi pemerintah menurut tahun dan sektor. Pendapatan domestik kota regional per kapita untuk berbagai-bagai daerah dapat dilihat sebagai berikut :

	Unit : Rp harga konstan 1977
1. Propinsi secara keseluruhan	95.814
2. Daerah sabuk pembangunan	123.108
3. Daerah minus	74.515
4. Daerah - daerah lain	76.139

Grafik S.2. : Perkiraan pertumbuhan GRDP per kapita berdasarkan Strategi Alternatif I.



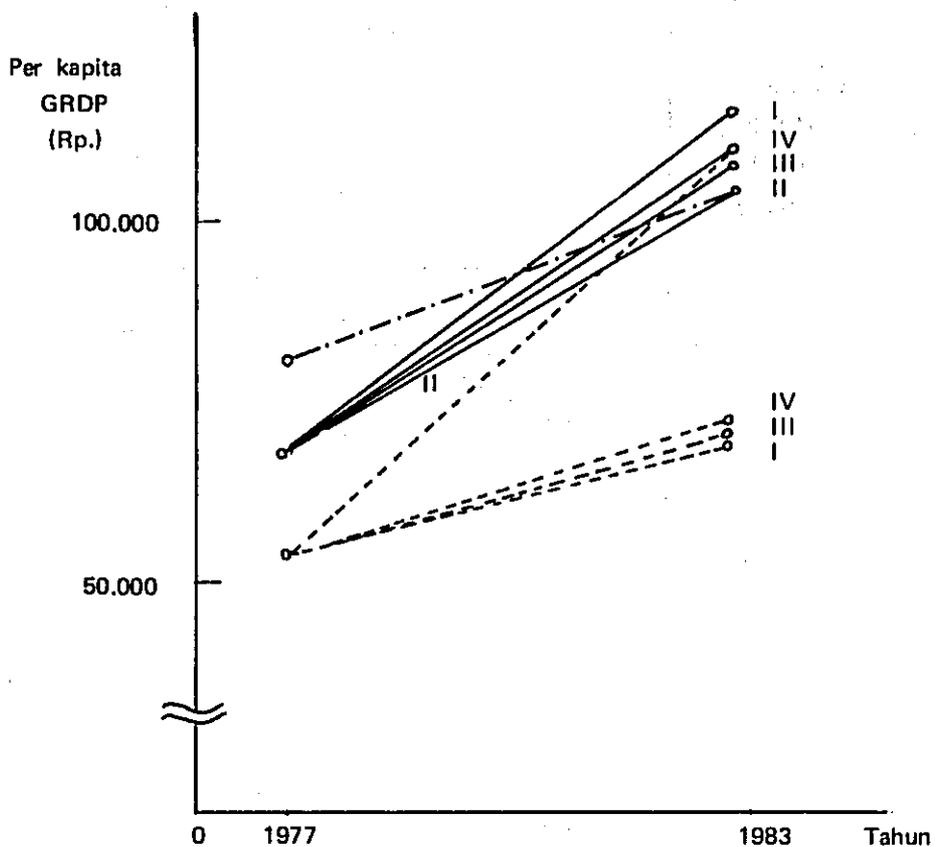
Keterangan :

- Propinsi
- - - Daerah Minus
- . . . 65% dari per kapita GDP nasional

- I : Strategi pertumbuhan yang berbeda
- II : Strategi daerah minus
- III : Strategi poros Cilacap
- IV : Strategi kependudukan

Sumber : Tabel 14.4, sampai 14.7.

Grafik S.3. : Perkiraan Pertumbuhan GRDP per kapita berdasarkan Strategi Alternatif II.



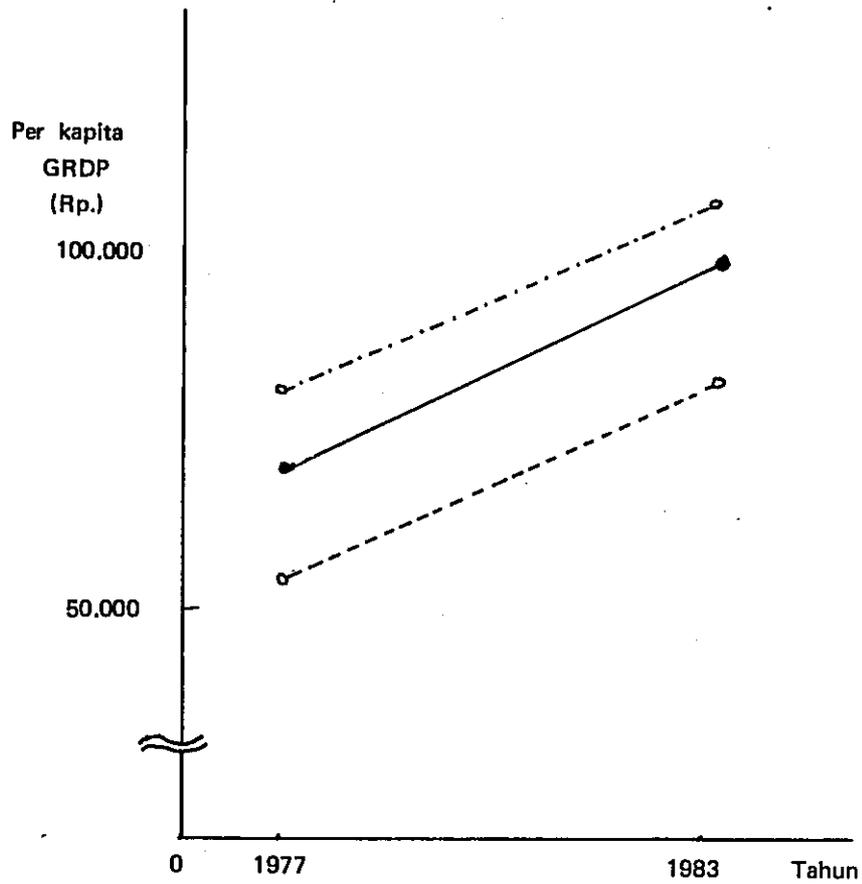
Keterangan :

- Propinsi
- Daerah Minus
- . - . - . 65% dari per kapita GDP nasional

- I : Strategi pertumbuhan yang berbeda
- II : Strategi daerah minus
- III : Strategi poros Cilacap
- IV : Strategi kependudukan

Sumber : Tabel 14.4, sampai 14.7.

Grafik S.4. : Perkiraan Pertumbuhan GRDP per kapita apabila Strategi yang diusulkan digunakan.



Keterangan :

- Propinsi
- - - - - Daerah Minus
- - 65% dari per kapita GRDP Nasional

Sumber : Team Studi

d. Program-program dan daerah-daerah prioritas pembangunan.

S.068 Untuk pelaksanaan "Revised Mixed Strategy", daerah prioritas dibagi menjadi dua bagian besar. Kemudian dibagi lagi menjadi daerah-daerah kecil seperti yang terlihat pada gambar S.5.

Daerah-daerah prioritas pembangunan

Blok besar	Blok kecil	Daerah utama yang termasuk di dalamnya
I	A	Kodya Semarang
	B	Dataran Tinggi Dieng, Wonosobo
	C	Magelang, Temanggung, Kopeng, Bandongan Demak, Kudus, Jepara
II	A	Cilacap
	B	Purwokerto, Banyumas, Baturaden

Walaupun demikian perlu dicatat bahwa peruntukan Daerah-daerah Prioritas Pembangunan diatas tidaklah berarti bahwa daerah-daerah lainnya diabaikan. Sebaliknya kebijaksanaan dasar dari strategi tak seimbang dan strategi daerah minus hendaknya dipertahankan.

S.069 Ciri-ciri pembangunan di setiap daerah prioritas pembangunan dan unsur utamanya diuraikan sebagai berikut :

(i). Daerah prioritas pembangunan I.

Tujuan Umum.

S.070 Sasaran pembangunan daerah ini adalah menggali potensi-potensi pembangunan di Propinsi sebanyak mungkin. Pembangunan daerah ini haruslah bertujuan untuk menyebarkan pembangunan dari Semarang ke arah daerah-daerah minus. Secara khusus, dua daerah minus akan menarik keuntungan dari pengembangan daerah ini.

Sektor-sektor pembangunan.

S.071 Ada tiga sektor yang akan mendapat perhatian khusus untuk pengembangan : Industri, Pariwisata dan Pertanian.

Pengembangan industri akan ditingkatkan di Semarang, Kudus, Magelang, Temanggung dan dataran tinggi Dieng.

Industri di Semarang akan diarahkan kepada penyebaran pusat-pusat kegiatan yang ada di Semarang.

Di Kudus dikembangkan industri didasarkan pada pengolahan tembakau dan percetakan.

Industri yang mengolah hasil-hasil pertanian akan dikembangkan di seluruh lokasi lainnya. Jadi, pembangunan daerah itu tergantung pada pengembangan di daerah-daerah sekitarnya.

S.072 Daerah pengembangan kepariwisataan sangat banyak, dua diantaranya yang penting adalah Borobudur dan dataran tinggi Dieng.

Tabel : S.1. INVESTASI PEMERINTAH YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK JAWA TENGAH 1978 / 79 - 1983 / 84.

(Unit : Jutaan rupiah)

	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Program INPRES	Dana Kab/ Kodya	Jumlah
1978/79	118,816	12,386	45,567	10,192	186,961
1979/80	129,073	13,215	49,501	11,072	202,863
1980/81	136,766	14,247	52,451	11,732	215,196
1981/82	144,460	15,364	55,401	12,392	227,617
1982/83	158,136	17,144	60,647	13,565	249,492
1983/84	167,538	18,487	64,252	14,372	264,650
Jumlah	854,790	90,845	327,819	73,325	1,346.779

Sumber : Tabel 14.3

Tabel : S.2. PROGRAM INVESTASI YANG DIREKOMENDASIKAN ¹⁾, MENURUT SEKTOR OLEH PEMERINTAH PUSAT UNTUK JAWA TENGAH, 1978 / 79 - 1983 / 84.

Sektor	Jumlah (milyard rupiah)	Prosentase (%)
Pertanian dan irigasi	240 ²⁾	20,3
Industri dan pertambangan	170	14,4
Tenaga listrik	270 ³⁾	22,8
Pengangkutan dan komunikasi	200	16,5
Pendidikan dan kepemudaan	70	5,9
Kesehatan dan Keluarga Berencana	80 ⁴⁾	6,8
Lain-lain	153 ⁵⁾	12,9
Jumlah	1.183	100,0

CATATAN : 1). Termasuk program INPRES.

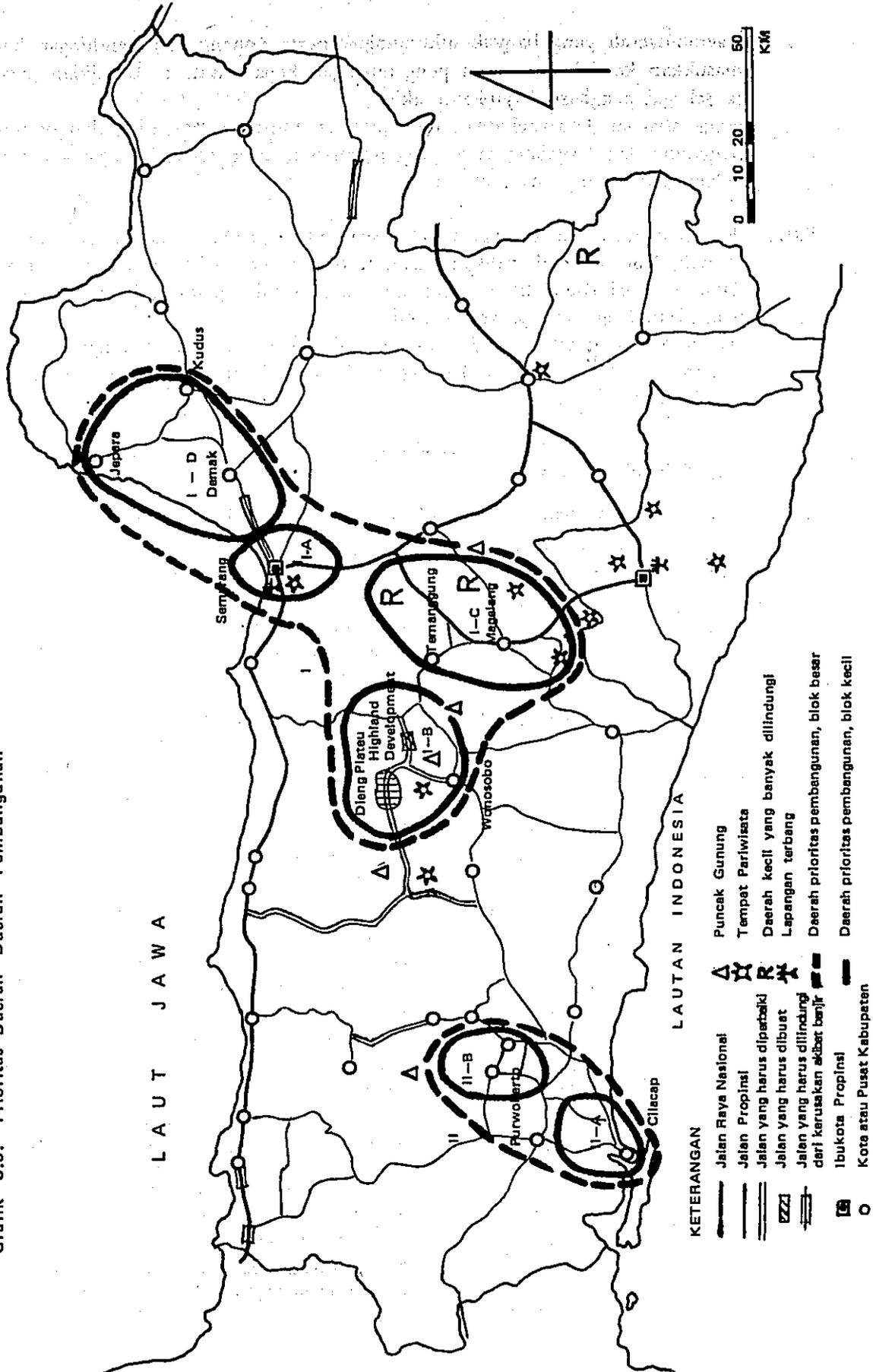
2). Termasuk investasi yang direkomendasikan untuk irigasi sebesar Rp 244 milyar (lihat Bab III, tabel 3.6), yang di-reduksi menjadi Rp 210 milyar.

3). Hanya untuk investasi yang direkomendasikan (lihat Bab IX, tabel 9.12), yang di-reduksi seperti tertera pada tabel diatas.

4). Termasuk investasi yang direkomendasikan untuk Keluarga Berencana sebesar Rp 64 milyar (lihat Bab XI Tabel 11.23).

5). Termasuk investasi yang direkomendasikan untuk pariwisata sebesar Rp 20 milyar (lihat Bab VIII, tabel 7.4).

Grafik S.5. Prioritas Daerah - Daerah Pembangunan



Daerah-daerah yang banyak dikunjungi seperti Kopeng dan Bandungan harus dimasukkan ke dalam rencana pengembangan kepariwisataan. Demikian juga Jepara sebagai penghasil kayu-kayu ukir.

Pengembangan kepariwisataan ini diarahkan untuk wisata asing dan domestik. Semarang dan Magelang memegang peranan penting sebagai lokasi kepariwisataan dalam sistim yang ada saat ini.

- S.073 Pertanian adalah sektor penting lainnya untuk pembangunan daerah ini. Demak, Kudus membutuhkan irigasi untuk meningkatkan produksi, sedangkan dataran tinggi Dieng khusus dikembangkan untuk tanaman dataran tinggi guna pengadaan bagi pasar-pasar tertentu. Daerah-daerah dataran tinggi lainnya akan digalakkan untuk pengembangan tanaman perdagangan seperti kacang tanah, kacang kedele, ternak unggas dan ternak lainnya

Sarana Pembangunan

- S.074 Untuk pembangunan itu diperlukan kelengkapan sebagai berikut :

Daerah	Sektor	S a r a n a
I - A	Industri	Pengembangan pelabuhan, Perencanaan kota, Kawasan Industri, Penyediaan air, Jalan raya, jasa-jasa lain untuk pengembangan industri.
	Pengembangan perkotaan	Perencanaan Kota, Pengembangan Tanah matang untuk perumahan, Perbaikan Kampung
I - B	Daerah wisata tani	Jalan-jalan raya, Pengembangan tanah-tanah pertanian, penyuluhan pertanian, Hotel/Restorant/lingkungan wisata kecil lainnya, Penyelamatan dan pemugaran benda-benda bersejarah, Tanah untuk industri, Penyediaan tenaga listrik.
I - C	Kepariwisataan/wilayahnya	Hotel/Restorant/fasilitas wilayah, tempat-tempat rekreasi, Penyelamatan dan pemugaran benda-benda bersejarah, Pengembangan tempat-tempat yang menunjukkan daerah pariwisata, Benda-benda kepariwisataan.
	Pertanian	Penyuluhan pertanian. Organisasi-organisasi pemasaran.
	Pengolahan pertanian	Penyuluhan industri, Kawasan Industri, Kelancaran pinjaman-pinjaman.
I - D	Pertanian	Tempat-tempat penampungan air, pengangkutan sistim pembuangan air, pengembangan saluran tertier, perlindungan jalan dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir, organisasi pemasaran.
	Pengolahan pertanian	Penyuluhan industri, organisasi perantara dan pemasaran, Kelancaran pinjaman.
	Industri	Penyuluhan industri, Perhubungan dan jalan-jalan yang baik, Kelancaran hubungan ke Semarang, Kelancaran pinjaman-2.

(ii). Daerah prioritas pembangunan II.

Tujuan Umum.

S.075 Sasaran pembangunan daerah ini adalah menopang pelaksanaan selanjutnya dari pengembangan potensi industri di dan sekitar Cilacap. Dalam waktu dekat ini, tekanan diberikan di daerah kecil yang berpusat di sekitar Cilacap dan Purwokerto yang relatif sedang berkembang dengan cepat.

Sektor-sektor pembangunan.

S.076 Sektor pembangunan utama daerah ini adalah industri di Cilacap. Namun demikian pengembangan industri-industri di Cilacap ini jangan sampai menyaingi pengembangan industri-industri di daerah Semarang. Karena relatif terencilnya daerah Cilacap, daerah ini mengkhususkan diri pada industri berat yang dapat menggunakan lebih efektif pelabuhan Samudera Cilacap. Pada saat yang sama, Cilacap juga dapat berfungsi sebagai pusat penyebaran bahan industri.

S.077 Untuk mendorong kelanjutan ektivitas ini, diperlukan aktivitas penunjang, yang termasuk dalam aktivitas penunjang ini adalah prasarana dalam arti luas (hard and soft infrastructure) seperti jalan raya, penyediaan tenaga listrik dan air untuk industri, pendidikan, rekreasi dan kebudayaan. Tersedianya hasil-hasil pertanian dengan baik juga dapat meningkatkan pembangunan daerah ini.

S.078 Usaha-usahapembangunan untuk daerah A secara jelas harus diarahkan kepada pembangunan industri-industri berat tertentu dan sistim distribusinya, sedangkan untuk daerah B harus diarahkan untuk peningkatan kebudayaan, pendidikan dan rekreasi sebagai aktivitas pelengkap untuk melaksanakan pembangunan daerah A. Aktivitas yang saling melengkapi dari dua daerah ini didasarkan kepada perbedaan alamiah dan latar belakang kebudayaan dari dua daerah yang bersangkutan, tetapi diperlukan sisa suatu strategi pengembangan yang dapat menyebarkan aktivitas pembangunan di Cilacap.

Sarana² pembangunan.

S.079 Sarana² berikut dapat dipakai untuk pembangunan.

Daerah	Sektor	S a r a n a
II - A	Industri	Peningkatan penyediaan tenaga listrik Peningkatan penyediaan air Perluasan tanah-tanah peruntukan industri Peningkatan jalan raya yang bisa dilalui Koordinasi untuk badan-badan Bantuan teknis pada Propinsi dan Kabupaten Kemungkinan pinjaman-pinjaman

(dilanjutkan)

II - B	Pemasaran	Peningkatan kelancaran jalan-jalan raya Kelancaran pinjaman
	Pertanian	Penyuluhan pertanian untuk diversifikasi tanaman Kelancaran pinjaman Peningkatan organisasi pemasaran
	Wilayah	Peningkatan kelancaran jalan raya, pembangunan lingkungan
	Pendidikan dan Kebudayaan	Perluasan dan peningkatan fasilitas-fasilitas dan staff

(iii). Langkah-langkah yang segera perlu diambil.

- S.080 Dua studi, masing-masing satu untuk setiap daerah, sudah harus dimulai untuk perencanaan dan koordinasi aktivitas pembangunan di kedua daerah tersebut. Setiap studi akan mengkaji situasi pembangunan daerah secara cermat di saat ini, dan mengindentifisir proyek-proyek yang sedang dan akan dilaksanakan dan juga mengindentifisir proyek-proyek masing-masing yang diperlukan untuk mengkoordinasikannya ke dalam pelaksanaan yang konsisten.
- S.081 Studi untuk daerah prioritas pembangunan I akan dilaksanakan oleh tenaga ahli asing dengan dibantu oleh team pendamping dari Pemerintah Indonesia. Daerah prioritas pembangunan II akan dilaksanakan oleh team ahli Indonesia yang dibantu oleh team ahli asing.
- S.082 Kebutuhan bulan kerja kedua studi tersebut diperkirakan sebagai berikut :

1. Studi daerah prioritas pembangunan I

(Unit : bulan kerja)

Keahlian	Team asing	Team pendamping
Manager proyek	10	10
Sumber-sumber air	10	10
Ahli pertanian	10	10
Perencana industri	6	6
Perencana kota	10	10
Perencana Kepariwisataaan	10	10
Ahli ekonomi	10	10
Perencana angkutan	6	6
Ahli pemasaran	6	6
Konsultan khusus	8	0
Jumlah :	86	78

2. Studi daerah prioritas pembangunan II.

(Unit : bulan kerja)

K e a h l i a n	Team lokal	Penasehat asing
Manager proyek	12	0
Perencanaan industri	12	12
Perencana fasilitas umum	12	12
Ahli pertanian	12	0
Arsitek	12	0
Perencana kota	12	0
Perencana angkutan	12	0
Jumlah :	96	24

S.2. URAIAN SINGKAT SEKTORAL DAN REKOMENDASI

S.2.1. SUMBER-SUMBER KEMANUSIAAN.

a. Profil struktur kependudukan.

S.083 Tingkat laju pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 1,6 % sampai 1,9 % per tahun selama periode 1971 sampai 1976 (lihat seksi 2.1.1.(c)).

S.084 Daerah aliran hulu Bengawan Solo dan daerah sekitar kotamadya dan kabupaten Tegal adalah daerah padat dan masih bertambah dengan cepat. Daerah Barat Laut Kabupaten Cilacap, dan jalur kabupaten-kecamatan Rembang, Pati dan Jepara di sebelah Tenggara berpenduduk relatif jarang tetapi bertambah dengan mantap. Daerah dataran tinggi Kabupaten Magelang, Temanggung dan Wonosobo mengikuti pola yang sama tetapi lebih kecil. Pertumbuhan Semarang terbatas hanya dalam kota itu sendiri (lihat seksi 2.1.2.(c)).

S.085 Penduduk di Jawa Tengah umumnya berusia muda kira-kira setengah adalah penduduk di bawah umur 14 tahun. Sedangkan daerah pedesaan kehilangan tenaga-tenaga muda, daerah perkotaan telah menarik tenaga muda tersebut tetapi juga kehilangan penduduk di atas 30 tahun (lihat seksi 2.1.3.(d)).

b. Dinamika penduduk dan masa depannya.

S.086 Selama dasawarsa tahun 60-an tingkat pertumbuhan penduduk diperkirakan 1,7 % per tahun yang terdiri dari 4,2 % tingkat kelahiran kasar dikurangi 2,1 % tingkat kematian kasar dikurangi netto penduduk yang keluar sebesar 0,4 %. (lihat seksi 2.2.1.(a)).

- S.087 Tingkat kesuburan 1000 wanita pada umur produktif adalah 5.380 pada tahun 60-an tersebut. Tingkat kesuburan ini mencapai titik maximum pada pertengahan tahun 60-an dan kemudian menurun secara perlahan, hal ini sebagian besar disebabkan oleh pemusatan kesuburan pada ibu-ibu yang berumur 20-an dan mendekati 30-an kemudian kesuburan ini menurun pada ibu-ibu dengan umur lainnya.
Kehidupan ekonomi kelihatannya mempunyai hubungan dengan tingginya tingkat kesuburan ini, dan walaupun ada pendidikan umumnya sedikit sekali pengaruhnya dalam mengurangi kesuburan ini. (lihat seksi 2.2.1. (e)).
- S.088 Perpindahan penduduk dari satu propinsi ke propinsi lain menurun di bawah 80.000 dan kadang-kadang lebih dari 100.000 orang per tahun pada akhir tahun 60-an, tetapi jumlah penduduk yang berpindah menurun.
Penduduk yang masuk ke Jawa Tengah setiap tahun diperkirakan antara 40.000 dan 60.000, sebagian kecilnya adalah penduduk yang kembali lagi dari perpindahannya (lihat seksi 2.2.3. (b) dan (c)).
- S.089 Jika faktor-faktor kependudukan masih tetap sama, penduduk Jawa Tengah akan menjadi 26 juta pada tahun 1981, 28 juta pada tahun 1986 dan hampir 32 juta di tahun 1991. Tingkat pertumbuhan penduduk per tahun akan tetap stabil di tahun 70-an, tetapi akan meningkat di tahun 1980-an pada tingkat 1,9 % per tahun pada periode 1981 sampai dengan 1986 dan 2,1 % pada periode 1986 sampai dengan 1991 (lihat seksi 2.2.4. (a)).

c. Angkatan Kerja.

- S.090 Jumlah tenaga kerja di Jawa Tengah berkisar pada jumlah 8 juta orang di tahun 1971 dimana 54 % adalah penduduk berumur 10 tahun dan lebih, atau 37 % dari jumlah penduduk keseluruhan. Relatif rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja sebagian besar dikarenakan oleh tingginya penduduk pada golongan umur muda dan rendahnya tingkat partisipasi wanita di daerah pedesaan (lihat seksi 2.3.1. (a)).
- S.091 Angkatan kerja tidak dibekali keahlian dan pendidikan yang baik; 80 % di antara mereka pada umur 10 tahun atau lebih tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar, rata-rata menghadiri pendidikan adalah 2,2 tahun.
Perbedaan-perbedaan chasanah geografis pendidikan di antara angkatan kerja sangat besar (lihat seksi 2.3.2.(b). dan (c)).
- S.092 Dari jumlah tenaga kerja, 63 % bekerja di sektor pertanian, 12 % di sektor perdagangan dan perhotelan 10 % di sektor industri pengolahan dan 9% pada sektor jasa-jasa lainnya.
Hanya sebagian kecil dari tenaga kerja yang bekerja sendiri, sementara pekerja sangat mobile sehubungan dengan keinginan untuk mendapatkan status lapangan kerja yang lebih berarti (lihat seksi 2.3.3.(a) dan (d)).

d. Pertumbuhan Angkatan Kerja di masa datang dan implikasi-implikasinya.

- S.093 Team studi memproyeksikan bahwa jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah tahun 1971 kira-kira 8 juta orang dan ini akan melebihi 12 juta pada tahun 1991, penambahan 54 % selama 20 tahun; rata-rata 200.000 orang tambahan angkatan kerja setiap tahunnya selama 20 tahun tersebut (lihat seksi 2.4.1.(b)).
- S.094 Dengan kecenderungan ekonomi seperti saat ini, komposisi angkatan kerja menunjukkan perubahan yang berarti. Tenaga kerja di sektor pertanian akan menurun dari 63 % di tahun 1971 menjadi 58 % di tahun 1991, sementara itu angkatan kerja di sektor industri pengolahan, konstruksi, pertambangan dan penggunaan lainnya akan meningkat dari 25 % menjadi 28 % (lihat tabel 2.16). Di sektor pertanian jumlah angkatan kerja akan terlihat kenaikan sebesar 1,4 kali selama 20 tahun proyeksi, sementara angkatan kerja di pertanian kecil / sempit akan meluas menjadi 1,8 kali atau dengan tambahan sekitar 1,2 juta jiwa (lihat seksi 2.4.2.(b)).
- S.095 Perlu dipikirkan dalam kerangka nasional secara keseluruhan cara-cara peningkatan kondisi lapangan kerja dan standard hidup penduduk. Kemampuan serap industri atas angkatan kerja di Jawa Tengah tidak cukup untuk dapat merubah keadaan (lihat seksi 2.2.2.).
- S.096 Investasi di sektor pertanian kurang berarti dalam menanggulangi masalah angkatan kerja pada tanah kecil di daerah pedesaan. Usaha-usaha yang perlu dikembangkan adalah intensifikasi yang memerlukan lebih banyak input tenaga kerja (lihat seksi 2.4.2.).
- S.097 Penelitian dan latihan harus dilaksanakan untuk mengatasi masalah teknologi untuk mengurangi kebutuhan investasi per pekerja di sektor industri pengolahan (lihat seksi 2.4.4.).
- S.098 Pemerintah Pusat maupun Daerah, harus mengalokasikan sumber-sumber yang perlu untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan dan juga diperlukan rencana yang terpadu secara baik di daerah pedesaan (lihat seksi 2.4.4.).

S.2.2. PENGEMBANGAN SUMBER - SUMBER AIR.

a. U m u m.

- S.099 Pengembangan sumber-sumber air adalah sangat penting untuk pembangunan standar sosial ekonomi di Jawa Tengah, karena air merupakan salah satu sumber yang sangat penting dan juga potensial.

Ada empat hal yang dijadikan perhatian utama :

1. Pembangunan tempat-tempat penampungan air baru dan mengawasi persediaan sumber-sumber air (lihat seksi 3.3.1.).
2. Meningkatkan sistim irigasi yang ada dan memanfaatkan se-maximum mungkin air-air yang tersedia (lihat seksi 3.3.1.).
3. Untuk mencegah banjir dan memperbaiki drainase di dataran rendah sepanjang pantai (lihat seksi 3.3.3.(d), dan
4. Untuk mencegah erosi tanah dan menampung air dengan cara mencegah penebangan hutan secara sewenang-wenang untuk membuka ladang serta mengusahakan penghutanan kembali (lihat seksi 3.4.4.).

b. Alokasi sumber-sumber pembangunan.

S.100 Tingkat alokasi sumber pada sektor ini yang telah dicapai pada tahun 1976/77 akan tetap dipertahankan sampai dengan akhir REPELITA III. Di antara berbagai macam kategori di sektor ini, "rehabilitasi dan pengembangan wilayah sungai" akan menerima bagian yang besar dari sumber-sumber dana pembangunan (lihat seksi 3.4.1.).

S.101 Jumlah investasi yang direkomendasikan oleh Pemerintah Pusat untuk sektor ini selama jangka waktu enam tahun dari tahun 1978/79 sampai tahun 1983/84 adalah Rp. 227,- milyar dimana sejumlah Rp. 126,- milyar harus dalam bentuk mata uang asing, sedangkan sejumlah Rp. 101,- milyar dalam biaya rupiah. (lihat seksi 3.4.3. dan tabel 3.6.).

c. Proyek-proyek Investasi yang direkomendasikan.

S.102 Proyek-proyek investasi yang tersebut di bawah ini direkomendasikan (lihat seksi 3.4.3.) untuk dilaksanakan (lihat tabel 3.6. untuk jadwal waktu tertentu).

1. Daerah aliran PEMALI - COMAL.

1. Pembangunan saluran tertier di daerah irigasi.
2. Perbaikan saluran drainage di daerah irigasi.
3. Waduk.
4. Pengendalian banjir di daerah yang rendah.

2. Daerah aliran JRATUNSELUNA

1. Pembangunan saluran tertier di daerah irigasi Glapan-Sedadi.
2. Rehabilitasi sistim pengairan di daerah Semarang - Kudus.
3. Perbaikan saluran drainase di dataran pantai Glapan - Sedadi, Semarang - Kudus dan Welahan.
4. Pengendalian banjir di dataran rendah daerah Sungai Serang dan Wulan.
5. Perbaikan saluran drainase di lembah sungai Juana.
6. Konstruksi 3 buah tempat penampungan air.

3. Daerah aliran SUNGAI SERAYU.

1. Pembangkit Listrik Tenaga Air Mrica dan Maung.

4. Daerah aliran SUNGAI PROGO.

1. Pengendalian Debris di sekitar Gunung Merapi.

5. Daerah aliran SUNGAI SOLO sebelah hulu.

1. Proyek serbaguna Wonogiri dan perbaikan daerah aliran hulu sungai Solo.

6. Daerah aliran SUNGAI KEDU SELATAN. (lihat seksi 3.3.2.(f)).

1. Proyek serbaguna Karangsembung.

d. Studi-studi yang direkomendasikan.

- S.103 Studi komprehensif mengenai pengendalian banjir dan sumber-sumber air di daerah Kabupaten Kendal dan Batang direkomendasikan. Daerah tersebut terletak antara Semarang dan Pekalongan dan kelihatannya belum pernah dicakup oleh suatu studi yang komprehensif. Menurut informasi yang tersedia, kira-kira 2.800 ha tanah di wilayah tersebut mengalami banjir rutin dan genangan air (lihat seksi 3.4.2.).

S.2.3 PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.

(a). Produksi padi.

- S.104 Sehubungan dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan ciri-ciri chasanah alamiahnya, padi akan tetap menjadi tanaman utama di masa depan di daerah Jawa Tengah.

Titik berat pada peningkatan produksi padi melalui program-program Pemerintah telah diperintahkan (lihat seksi 4.4.1.).

- S.105 Dalam hubungan ini, usaha selanjutnya sebaiknya diarahkan pada peningkatan hasil produksi. Hal ini dapat dicapai dengan cara memilih varitas bibit padi yang tepat dan memperbaiki dosis khusus serta saat penggunaan pupuk yang relatif terhadap ciri-ciri tanah dan varitas yang ditanam. Tentu saja, perluasan daerah yang diairi merupakan alat penting lainnya untuk meningkatkan produksi pertanian. Perhatian juga hendaknya diarahkan untuk meningkatkan hasil produksi padi di daerah dataran tinggi (lihat seksi 4.4.2.).

(b). Pencegahan kerusakan akibat hama tikus.

- S.106 Kerusakan tanaman padi dan tebu akibat hama tikus telah nyata di Propinsi Jawa Tengah, terutama di Kabupaten-kabupaten pegunungan.

Suatu studi komprehensif mengenai metode pencegahan kerusakan akibat hama

tikus hendaknya diusahakan bersama oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dengan bantuan dari Badan-badan Internasional dan/atau negara-negara yang telah berpengalaman dalam bidang ini. (lihat seksi 4.4.3.).

(c). Tanaman Non - Padi.

- S.107 Usaha-usaha akan diarahkan untuk pengembangan tanaman bernilai tinggi yang telah diseleksi. Kacang kedele dan jagung patut mendapat perhatian sungguh-sungguh dan oleh sebab itu, riset sebaiknya diarahkan untuk memperbaiki varietas serta metode produksi dari tanaman-tanaman tersebut (lihat seksi 4.4.4.(a)).
- S.108 Dapat ditambahkan disini bahwa suatu studi harus dilaksanakan untuk memperbaiki pergiliran tanaman dengan cara membandingkan serta menghubungkannya dengan tanaman-tanaman potensiil di daerah-daerah tertentu (lihat seksi 4.4.4.(a)).

(d). Kehutanan

- S.109 Keadaan tanah di Propinsi Jawa Tengah sudah terlalu jenuh untuk ditanami dipandang dari sudut persediaan air dan pengawetan tanah, dan penghutanan kembali harus mendapat prioritas pertama. Di lain pihak sumber-sumber kehutanan yang mahal seperti kayu jati dijadikan kayu bakar, bahan bakar untuk locomotive serta bantalan kereta-api. Hal ini merupakan pemborosan. Oleh sebab itu sejumlah tindakan dibutuhkan di dalam bidang ini sebagai berikut (lihat seksi 4.4.5.).
- 1). Memperbaiki pengangkutan antar pulau untuk memudahkan import kayu jenis lebih murah untuk bahan bakar.
 - 2). Memperkenalkan kerosin dan gas alam untuk memasak di kota-kota, serta menggunakan diesel sebagai bahan bakar locomotive dan balok semen untuk bantalan kereta-api.
 - 3). Menggantikan tanah hutan nasional yang terletak di dataran rendah ke tanah di dataran-dataran tinggi, sehingga kapasitas penyimpanan air untuk tanah-tanah hutan dapat diperbaiki.
 - 4). Varietas tanaman yang lebih banyak hendaknya disediakan untuk Program Penghijauan termasuk pohon-pohon murbei yang dapat digunakan untuk peternakan ulat sutera. Perhatian khusus sebaiknya diberikan pada tanaman-tanaman ini karena dapat memenuhi sejumlah tujuan :
 - 1) penghijauan, 2) pengembangan industri pertanian yang mempunyai potensi ekspor, dan 3) persediaan kayu bakar (untuk memasak).

(e). Tanaman-tanaman untuk daerah Rembang, Blora dan Grobogan.

S.110 Daerah-daerah dengan persediaan air yang tidak tetap seperti sebagian besar Kabupaten Rembang, Blora dan Grobogan akan mendapat perhatian khusus di dalam seleksi tanaman-tanaman yang sesuai dengan kondisi kering. Tanaman-tanaman yang dapat diharapkan adalah sebagai berikut : (1) Sorghum, (2) beberapa jenis kacang-kacangan seperti pigeon pear, kacang hitam, kacang hijau dan *P. calcoratus* serta (3) bunga matahari (lihat seksi 4.4.6., 6.7.10 dan 6.7.11.).

S.111 Di antaranya, sorghum akan ditanam dalam kaitannya dengan produksi peternakan dan bunga matahari dalam kaitannya dengan penyaringan pati minyak yang dapat dimakan. Industri minyak harus dilaksanakan secara simultan. Sebagai tambahan, ampas minyak yang berasal dari bunga matahari dapat digunakan untuk makanan ternak dan peternakan tawon (lihat seksi 4.4.6.).

(f). Pengembangan pertanian dataran tinggi.

S.112 Potensi pembangunan pertanian yang nyata di dataran tinggi (500 meter di atas permukaan tanah) seperti produksi sayur-mayur dan tanaman tahunan, peternakan, serta peternakan ulat sutera maupun pariwisata harus dilaksanakan dengan cara memperbaiki kelancaran dari daerah-daerah dataran tinggi ke pusat-pusat yang lebih besar.

Suatu studi yang komprehensif sebaiknya dilakukan untuk pembangunan daerah tertentu yang telah diseleksi, mungkin di dataran tinggi Dieng dan sekitarnya, serta memperhitungkan organisasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya (lihat seksi 4.4.7.) dan potensi pemasaran.

(g). Pusat-pusat pengembangan pertanian.

S.113 Penelitian pertanian akan dipusatkan sehingga petunjuk-petunjuk yang lebih detail dapat diberikan kepada para petani di berbagai macam kondisi yang berbeda. Pendirian lima buah Pusat-pusat Pengembangan Pertanian yang telah direncanakan hendaknya dilaksanakan sesegera mungkin dan masing-masing pusat khusus menangani penelitian macam tanaman tertentu yang cocok untuk masing-masing daerah (lihat seksi 4.4.8.).

(h). Perencanaan Daerah Pertanian yang terpadu.

S.114 Perencanaan pengembangan pertanian yang dikerjakan oleh sejumlah Dinas di Jawa Tengah hendaknya dipadukan. Untuk maksud ini, suatu studi mengenai perencanaan daerah pertanian yang terpadu sebaiknya dimulai berdasarkan petunjuk Departemen Pertanian dengan bantuan tenaga-tenaga ahli (lihat seksi 4.4.9.).

S.2.4 PEMASARAN HASIL PERTANIAN DAN ORGANISASI PEDESAAN

(a). Pemasaran hasil pertanian.

S.115 Program-program dan kebijaksanaan-kebijaksanaan ini direkomendasikan untuk pemasaran hasil pertanian (lihat seksi 5.5.1.).

- 1). Kebebasan yang lebih besar akan diberikan kepada para pedagang sehingga pemasaran hasil pertanian akan menjadi lebih efisien. Ongkos-ongkos serta pengawasan pengangkutan barang-barang di tempat-tempat pengawasan akan dikurangi se-sedikit mungkin.
- 2). Pinjaman akan diberikan kepada para pedagang untuk menutup ongkos pemasaran.
- 3). Bantuan kepada BUUD / KUD untuk kredit pemasaran hendaknya ditingkatkan. Sekitar Rp 700,- juta seharusnya disediakan untuk menutupi kebutuhan kredit bagi penggilingan padi setiap tahun.
- 4). Suatu studi sistim pemasaran untuk tanaman dataran tinggi hendaknya dikerjakan untuk menggalakkan pembangunan di daerah pedesaan yang kurang berkembang.
- 5). Sejumlah besar gudang DOLOG hendaknya diperbaiki. Biaya perbaikan ini akan berkisar jumlah Rp 500,- juta.
- 6). Program Candak Kulak sebaiknya dilanjutkan.
- 7). Program-program kredit pedesaan yang bermacam-macam dan yang ada sekarang ini segera akan dilaksanakan sebaiknya dikoordinasikan. Peranan yang lebih besar harus diberikan kepada Badan Kredit Pedesaan serta BRI Unit Desa.

(b). BUUD / KUD.

S.116 Rekomendasi untuk BUUD / KUD adalah sebagai berikut (lihat seksi 5.5.2. (a) s/d (f).).

- (1) Untuk kepentingan yang diharapkan di masa depan, usaha-usaha hendaknya diarahkan kepada perbaikan perwujudan dari fungsi-fungsi BUUD / KUD sekarang dengan suatu kemungkinan pengecualian untuk penyediaan kredit. Diversifikasi lebih lanjut dari aktivitas-aktivitas BUUD / KUD sebaiknya tidak ditujukan pada maksud tersebut.
- (2) BUUD / KUD dapat berfungsi lebih baik dengan menambah penyediaan kredit operasional kepada para anggotanya, akan tetapi sebelum persetujuan diberikan kepada BUUD / KUD tertentu untuk beroperasi, suatu seleksi yang teliti untuk BUUD / KUD bersangkutan harus dilakukan.

- (3) Untuk memperkuat dasar keuangan KUD - KUD, perubahan standard perundang-undangan perlu dilakukan.
- (4) Laporan yang diperlukan untuk BUUD / KUD hendaknya disederhanakan, sambil menjaga fungsi monitoring daripada laporan-laporan tersebut.
- (5) Sistim perangsang pembiayaan hendaknya diperkenalkan pada BUUD / KUD.

(c). Penyuluhan Pertanian.

S.117 Rekomendasi untuk penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut (lihat seksi 5.5.2. (g) dan (h).) :

- (1) Proyek Perluasan Tanaman Pangan nasional yang mendapat bantuan dari IBRD hendaknya dikembangkan.
- (2) Perhatian lebih besar hendaknya diberikan kepada penyuluhan produksi tanaman dataran tinggi.

(d). Gotong - royong.

S.118 Sistim gotong royong yang dikenal sekarang ini telah digunakan secara efektif untuk maksud pembangunan pedesaan. Penggunaan yang terbesar dan kreatif dari sistim ini digalakkan (lihat seksi 5.5.2. (i).).

S.2.5 PERTAMBANGAN DAN INDUSTRI PENGOLAHAN.

(a). Kebijakan yang direkomendasikan.

(i). Prioritas Investasi.

S.119 Untuk memperbaiki tingkat pemakaian kapasitas produksi yang ada, kebijaksanaan berikut harus dipertahankan (lihat seksi 6.7.3.).

- (1) Proyek-proyek investasi baru yang dapat menyaingi proyek-proyek yang sudah ada dalam hal penggunaan bahan-bahan mentah yang dihasilkan di Jawa Tengah, sebaiknya jangan digalakkan (lihat seksi 6.4.1.).
- (2) Proyek-proyek investasi yang akan memperbaiki kapasitas pemakaian perseediaan modal yang harus digalakkan.
- (3) Prioritas tertinggi harus diberikan kepada mekanisasi selektif bagi industri pengolahan tanaman pertanian di lapangan seperti pengolahan bahan makanan, hasil-hasil hutan dan sejenisnya, pengolahan logam, tanah liat dan sejenisnya. (lihat paragraphs 06.076 dan 06.181).

(ii). Meningkatkan koordinasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat.

S.120 Untuk menghindari duplikasi investasi yang tidak dapat dibenarkan dan

menyalurkan penanaman modal yang akan datang ke lokasi yang layak dilihat dari segi Pembangunan Nasional, suatu sistim koordinasi antara dua badan koordinasi penanaman modal sebaiknya diciptakan. Sistim koordinasi seperti dimaksud tidak hanya membutuhkan aliran-aliran informasi yang terus menerus yang diperlukan oleh calon-calon penanam modal (applicant) tapi juga rencana pengembangan industri masing-masing Propinsi yang dikoordinasikan pada tingkat nasional (lihat seksi 6.7.8.).

(b). Program-program yang direkomendasikan.

(i). Perbaikan statistik perindustrian.

S.121 Statistik perindustrian sedang berada jauh ketinggalan dari kebanyakan statistik lainnya dalam hal mutu. Memang, statistik perindustrian adalah yang paling sulit dikumpulkan, statistik yang tersedia dirusak oleh kesalahan yang tidak hati-hati selama proses pengumpulan dan publikasi. Untuk perbaikan sistim pengumpulan dan kompilasi statistik perindustrian disarankan agar seorang ahli asing dalam statistik perindustrian diundang ke Jawa Tengah selama 12 bulan untuk membuat tinjauan menyeluruh tentang metode-metode yang ada sekarang ini (lihat seksi 6.7.6.).

(ii). Memperkuat Penyuluhan Perindustrian.

S.122 Efektivitas penyuluhan perindustrian dapat diperbesar melalui :

- (1) BIPIK memusatkan dirinya pada perencanaan yang menyeluruh, pelayanan latihan bagi staf BAPPIKRA dan membatasi pelayanan BIPIK kepada daerah-daerah yang dipilih, dan
- (2) BAPPIKRA mengusahakan penyuluhan yang lebih luas kepada industri ukuran kecil, rumah tangga dan gubuk-gubuk industri melalui petugas-petugasnya yang dipekerjakan pada pemerintah setempat (lihat seksi 6.7.5.).

S.123 Disamping itu, tekanan yang lebih besar diberikan pada aspek pemasaran. Satu contoh sederhana dari kebijaksanaan ini adalah lebih memanfaatkan ruang pameran yang ada sekarang bagi produksi-produksi lokal. Pelayanan latihan untuk pejabat-pejabat penyuluhan perindustrian juga harus dapat melaksanakan pemanfaatan booklet yang telah dihasilkan/ada.

(iii). Program Perbaikan sistim Distribusi.

S.124 Pemerintah Tingkat Propinsi sebaiknya memberikan intensif kepada calon-calon pengusaha setempat untuk memulai satu sistematika sistim "putting out" untuk membantu industri berukuran kecil (*small state industri*) dan industri rumah tangga. Dengan perkataan lain, badan-badan ini yang secara teratur memberikan/

- menyediakan bahan-bahan untuk dikerjakan di unit industri pengolahan primer dan juga secara teratur mengumpulkan produk-produk dari mereka dan memerintahkan propinsi perlu mengarahkan unit-unit primer ini, sebaiknya dilengkapi dengan perangsang keuangan (lihat seksi 6.6.4. dan 6.7.6.).
- (iv). Pameran dan lomba Tahunan bagi hasil-hasil kerajinan tangan.
- S.125 Pameran dan lomba Tahunan sebaiknya dikembangkan oleh Pemerintah Daerah untuk memperbesar motivasi pengrajin. Gubernur akan memberikan hadiah-hadiah sesuai dengan tingkat keahlian dan potensi perkembangannya (lihat seksi 6.7.7.).
- (v). Promosi Industri Pengolahan Minyak Kacang Kedele dan Kacang Tanah.
- S.126 BKPM.D harus memberikan perhatian khusus kepada pengembangan industri pengolahan minyak kedele dan kacang tanah. Karena khususnya sektor ini mempunyai harapan yang baik. (lihat seksi 6.7.10.).
- (vi). Promosi Proyek Percontohan untuk Industri Pengolahan Minyak Bunga Matahari.
- S.127 Pemerintah Daerah dan BAPPEDA sebaiknya memulai suatu proyek percontohan untuk menanam bunga matahari dan mengumpulkan biji-biji bunga matahari (oleh anak-anak sekolah) agar industri pengolahan minyak bunga matahari memungkinkan (lihat seksi 6.7.11.).
- (c). Rekomendasi studi-studi dan Rencana Percontohan yang direkomendasikan.
- (i). Studi Promosi Cabang-cabang Industri Rumah Tangga dan Industri Ukuran Kecil yang mempunyai nilai tambahan yang tinggi.
- S.128 BAPPEDA dan Dinas Perindustrian Tingkat Propinsi harus membentuk satu team studi yang khusus mengerjakan identifikasi proyek-proyek yang berkelayakan bagi kegiatan-kegiatan produksi yang menghasilkan nilai tambah tinggi dan merencanakan cara-cara pelaksanaan proyek-proyek yang diidentifikasi tadi dalam sektor industri ukuran kecil dan industri rumah tangga. Diperlukan jasa-jasa tenaga-tenaga asing selama 36 bulan kerja. (lihat seksi 6.7.2.).
- (ii). Rencana Percontohan untuk diversifikasi industri ukuran kecil dan industri rumah tangga.
- S.129 Sebagai tahap pertama, suatu pabrik percontohan desa dapat didirikan untuk menghasilkan kemeja dan celana jadi dengan 50 macam mesin jahit yang dijamin oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dijadikan sebagai "test case" bagi

diversifikasi industri maupun bagi sistim "putting out".
Seorang instruktur akan diperlukan untuk melatih wanita-wanita muda untuk menjahit (lihat seksi 6.7.4.).

(iii). Studi Pengembangan Prasarana bagi Promosi Kawasan Industri Semarang di Tugu.

S.130 Sangat diperlukan adanya suatu studi Pengembangan Prasarana bagi Promosi Kawasan Industri Semarang Tugu, Studi harus dilakukan sebelum pembangunan pelabuhan Semarang yang sedang terancam dan kawasan industri ini hendaknya dikaitkan dengan Pembangunan Semarang secara keseluruhan. Dua orang ahli asing selama 12 bulan kerja (man months) adalah penting untuk studi ini (lihat seksi 6.7.9.).

S.2.6 KEPARIWISATAAN.

(a). Pengembangan Potensi Pariwisata di Jawa Tengah.

S.131 Pariwisata adalah salah satu sektor yang paling memberikan harapan baik di Jawa Tengah, karena Propinsi ini mempunyai kekayaan pariwisata (tourism assets) yang berlimpah-limpah. Di antara berbagai-bagai potensi pariwisata, berikut ini adalah lokasi-lokasi / benda kepariwisataan yang pada prinsipnya dapat dikembangkan lebih jauh.

- (1) Dataran Tinggi Dieng - benda-benda kepurbakalaan, mata air panas dan tempat-tempat yang banyak dikunjungi (lihat seksi 7.6.3.).
- (2) Surakarta - benda-benda kepurbakalaan, barang-barang kebudayaan dan batik (lihat seksi 7.6.4.).
- (3) Borobudur dan Prambanan - benda-benda kepurbakalaan (lihat seksi 7.6.5.).
- (4) Pantai-pantai dan ukir-ukiran kayu di Jepara (lihat seksi 7.6.1.).
- (5) Wonogiri - rekreasi air di Waduk (lihat seksi 7.6.2.).
- (6) Daerah-daerah yang banyak dikunjungi seperti Tawangmangu, Baturaden, Korpeng dan Bandungan (lihat seksi 7.6.6.).
- (7) Semarang - kehidupan perkotaan, kebudayaan dan fasilitas serta pelayanan pariwisata.

S.132 Untuk pengembangan yang tepat dari kekayaan ini, diperlukan data yang sistimatis dari kegiatan-kegiatan kepariwisataan oleh pemerintah daerah (lihat seksi 7.6.8.).

(b). Pengembangan pariwisata di daerah Semarang - Yogyakarta.

S.133 Satu studi harus dilaksanakan sebagai langkah pertama bagi pengembangan pariwisata di jantung Jawa Tengah yang meliputi Semarang di sebelah Utara, dataran tinggi Dieng di sebelah Barat, Yogyakarta di sebelah Selatan dan Surakarta di sebelah Timur. Hal ini hendaknya merupakan bagian yang menyatu dari daerah studi yang diusulkan pada bagian I dalam buku ringkasan ini (lihat seksi S.1.3. (iii)).

S.2.7 PENGANGKUTAN.

(a). Pengangkutan Jalan Raya.

S.134 Rekomendasi dari pengangkutan jalan raya adalah sebagai berikut :

- (1) Dengan semakin meningkatnya peranan jalan-jalan raya, perhatian yang besar hendaknya diberikan pada macam-macam alat angkutan (lihat seksi 8.1.).
- (2) Perhatian utama hendaknya diberikan pada bagian-bagian dari jalan negara dan jalan propinsi yang secara kronis dirusak oleh banjir dan genangan. Bagian ini harus diperiksa untuk diperbaiki tidak hanya dari pandangan pengangkutan jalan raya tetapi juga dari pandangan pengendalian banjir dari saluran air. Jalan-jalan raya ini terletak di daerah Pati, Brebes, Tegal dan Kebumen (lihat seksi 8.2.4. (a)).
- (3) Kelas jalan yang ada saat ini dan kriteria penanaman modal hendaknya diteliti kembali sehingga alokasi dan investasi yang terbaik dapat dibuat (lihat seksi 8.2.4. (b)).
- (4) Teknologi konstruksi dan peningkatan jalan yang digunakan saat ini hendaknya diteliti kembali, sehingga daya tahan jalan dapat ditingkatkan. Perhatian utama harus diberikan kepada pemakaian teknologi mesin untuk konstruksi dasar jalan (lihat seksi 8.2.4. (c)).
- (5) Peningkatan kelancaran untuk mencapai daerah minus hendaknya dilaksanakan melalui perbaikan jalan-jalan (lihat seksi 8.2.4. (d)). Pertimbangan hendaknya diberikan pada rekomendasi sementara seperti terlihat pada grafik S.5.

(b). Pengangkutan Kereta - api.

S.135 Perbaikan yang akan datang harus dikonsentrasikan pada jalan K.A. dan pada waktu yang bersamaan satu studi harus dilaksanakan untuk perencanaan phase berikutnya dari jalur cabang lainnya dengan mempertimbangkan bentuk alternatif jumlah alat angkutan lain yang diperlukan (lihat seksi 8.3.4. (a)).

S.136 Mempertimbangkan peningkatan yang akan datang pada pendistribusian kegiatan di Cilacap, perbaikan hendaknya dibuat dengan menghubungkan jalur Cilacap dengan Tegal (lihat seksi 8.3.4. (b).).

(c). Pelabuhan - pelabuhan.

S.137 Studi untuk pengembangan pelabuhan Semarang yang sedang dibuat saat ini harus memberikan perhatian yang serius jika pembangunannya dianggap vital untuk pengembangan Propinsi secara keseluruhan di masa yang akan datang. Dalam hubungan dengan perbaikan pelabuhan, prasarana darat juga harus mendapat pertimbangan untuk perbaikan (lihat seksi 8.4.2.(c), 8.4.4.(d) dan paragraph 08.053).

S.138 Untuk pelabuhan Cilacap, perhatian hendaknya diberikan pada prasarana darat seperti jalan-jalan, jalan-jalan kereta api, pengadaan air untuk industri dan lain-lainnya (lihat seksi 8.4.4. (c).).

(d). Pengangkutan Udara.

S.139 Diperlukan satu studi untuk perbaikan pelabuhan udara Semarang. Studi harus memperhitungkan tingkat kecepatan pertambahan jumlah penumpang dan harus diuji kebutuhan perluasan landasan dan perbaikan fasilitas terminal dan pelayanan-pelayanan lainnya yang berhubungan dengan itu (lihat seksi 8.5.3.).

S.2.8 PELAYANAN KEPENTINGAN UMUM.

(a). Tenaga Listrik.

S.140 Rekomendasi untuk sektor tenaga listrik adalah sebagai berikut :

- (1) Secara keseluruhan pengembangan sumber-sumber tenaga dan transmisinya dan fasilitas distribusi merupakan prioritas utama (lihat seksi 9.1.6. (a).).
- (2) Hubungan satu daerah dengan daerah-daerah lain hendaknya dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan (lihat seksi 9.1.6. (b).).
- (3) Diperlukan peningkatan pelayanan umum dari PLN (lihat seksi 9.1.6. (c).).
- (4) Untuk pengembangan industri di Cilacap diperlukan koordinasi yang baik antara sektor ketenagaan dan sektor industri (lihat seksi 9.1.6. (e).).
- (5) Untuk perlistrikan di desa, diperlukan tingkat koordinasi yang besar antara PLN dengan Pemerintah Daerah (lihat seksi 9.1.6. (f).).

(b). Telekomunikasi.

S.141 Rekomendasi untuk pengembangan telekomunikasi adalah sebagai berikut :

- (1) Perhatian hendaknya diberikan kepada perkiraan permintaan akan sambungan

telepon di daerah yang tidak ada sambungannya dan untuk pengembangan yang memadai dari teknologi telepon seperti sistim telepon yang bergelombang pendek yang digerakkan dengan baterai untuk setiap permintaan khusus. Perhatian utama hendaknya diberikan pada sambungan telapon di antara semua pusat-pusat Kabupaten (lihat seksi 9.2.4.).

- (2) Biaya telepon hendaknya mencerminkan suatu biaya yang wajar dari pelayanan yang diberikan. Terutama biaya instalasi perlu diuji kembali (lihat seksi 9.2.1. (c).).
- (3) Untuk siaran radio dan televisi, targetnya harus bisa mengcover saluran daerah propinsi, untuk maksud ini 2 stasiun radio transmisi gelombang menengah di Purwokerto dan D.I. Yogyakarta dan beberapa stasiun transmisi T.V. hendaknya dibangun (lihat seksi 9.2.4.).

(c). Penyediaan air dan sanitasi.

(i). Penyediaan air untuk daerah perkotaan.

S.142 Untuk daerah perkotaan, program penyediaan air hendaknya ditujukan bagi perbaikan situasi sekarang dengan memilih teknologi yang memadai di antara berbagai alternatif. Alternatif-alternatif tersebut antara lain :

- (1) Pencairan sumber-sumber air yang berkwalitas baik.
- (2) Pencairan sumber-sumber air untuk umum daripada perorangan.
- (3) Penggunaan pengangkutan bagi air yang berkwalitas baik daripada menggunakan pipa.
- (4) Pendistribusian peralatan air yang sederhana untuk rumah-rumah penduduk.
- (5) Kampanye pendidikan untuk dapat mengklasifikasikan pemakaian air yang berbeda kualitasnya sesuai dengan tujuan pemakaiannya.
- (6) Kampanye pendidikan untuk menyebar luaskan penggunaan air yang telah masak untuk konsumsi manusia (lihat seksi 9.3.2. (d).).
Untuk tujuan pelaksanaan kampanye pendidikan ini sistim yang ada sekarang di Dinas Penyuluhan Kesehatan hendaknya dimobilisir.

(ii). Penyediaan air untuk daerah pedesaan.

S.143 Untuk daerah pedesaan, satu pendekatan yang sama seperti di atas, tetapi dengan perubahan beberapa unsur dapat dilaksanakan. Untuk maksud ini komponen penyediaan air dari program Inpres Kesehatan harus lebih diperluas (lihat seksi 9.3.3. (c).).

S.144 Diperlukan suatu penelitian yang sistimatis mengenai keadaan penyediaan air dan potensi pengembangan air di setiap desa. Penelitian ini hendaknya dilaksanakan bersama-sama dengan teknik penyehatan (lihat seksi 9.3.3. (c).).

(iii). Teknik Penyehatan.

- S.145 Untuk daerah perkotaan, teknik penyehatan hendaknya dilaksanakan dengan menggabungkan penggunaan truk-truk tangki untuk pengumpulan kotoran-kotoran dari kakus-kakus ke tempat-tempat pusat penawaran. Kegiatan ini hendaknya dilaksanakan untuk seluruh Kodya dan pusat-pusat Kabupaten (lihat seksi 9.4.3. (a).).
- S.146 Untuk daerah pedesaan program pembangunan MCK hendaknya ditingkatkan (lihat seksi 9.3.4. (b).).

S.2.9 PEMUKIMAN DAN FASILITAS KEMASYARAKATAN.

(a). P e m u k i m a n.

- S.147 Masalah pemukiman di Jawa Tengah adalah sama dengan dimana-mana, sejumlah besar masalah-masalah yang kompleks dimulai dari peningkatan penduduk yang mutlak dan urbanisasi sampai ke masalah kemiskinan dan ketidak-cukupan perencanaan. Akibatnya, suatu ukuran batasan yang luas hendaknya dilaksanakan untuk memperbaiki masalah pemukiman di Jawa Tengah. Ukuran-ukuran ini dapat diuraikan di beberapa bagian daripada laporan ini (lihat seksi 10.1.).

(b). Perumahan Rakyat.

(i). Proyek-proyek Perbaikan Kampung (KIP).

- S.148 Proyek-proyek perbaikan kampung (KIP) hendaknya dipersiapkan dan dilaksanakan untuk kota-kota dan pusat Kabupaten seperti : Semarang, Surakarta, Cilacap, Pekalongan, Purwokerto, Kebumen, Jepara dan Kudus. Sebagai langkah pertama bantuan hendaknya diberikan kepada kota dimana sebuah proyek akan dilaksanakan pertama-tama oleh Pemerintah Pusat untuk memilih lokasi proyek dan rencana pengembangan. Untuk pelaksanaan proyek KIP ini jumlah biaya investasi yang dibutuhkan untuk 4 kota, Semarang, Kudus, Purwokerto dan Jepara adalah sekitar 9,28 milyar rupiah (ke empat kota tersebut dipilih oleh Pemerintah Pusat). (lihat seksi 10.2.5. (b). dan 10.2.2. (a) (i).).

(ii). Proyek Penyediaan Tanah dan Perlengkapannya (Site & Services).

- S.149 Mengenai proyek-proyek Site & Services, standard proyek-proyek yang sedang berjalan ini sangat tinggi untuk Jawa Tengah. Karenanya satu bentuk yang sedikit lebih murah hendaknya dipikirkan pelaksanaannya di Jawa Tengah. Bentuk ini biayanya akan berkisar $\frac{1}{2}$ dari yang sudah dilaksanakan sekarang ini per lokasi perumahan (housing site). (lihat seksi 10.2.5. (c).)

S.150 Proyek-proyek Site & Services akan diperlukan di Semarang, Tegal dan Surakarta. Di antara kota-kota tersebut Semarang sendiri akan memerlukan 820 bh. per tahun. Perkiraan biaya pembangunan per tahun untuk ke-3 kota ini adalah sebesar Rp 393,- juta (lihat seksi 10.2.5. (c) dan (f)).

(iii). Program Perumahan Desa.

S.151 Program perumahan desa hendaknya ditingkatkan untuk sampai pada 1 proyek per Kecamatan pada akhir REPELITA III. Dalam program ini prioritas hendaknya diberikan pada sub program rehabilitasi ketimbang model program perumahan. Juga hendaknya diperluas sub program MCK ketimbang sub program penyediaan air (lihat seksi 10.2.5. (e)).

(c). Fasilitas Kesehatan.

S.152 Puskesmas -Puskesmas hendaknya dibangun sehingga setidaknya-tidaknya 1 Puskesmas melayani lebih dari 30.000 orang pada akhir REPELITA III. Pembangunan ini hendaknya dilaksanakan tidak hanya pembangunan baru tetapi juga meng-upgrade poliklinik - poliklinik yang ada, rehabilitasi balai-balai pengobatan yang lama dan klinik - klinik K.B. Jumlah tambahan keseluruhan pembangunan Puskesmas ialah 576 bh. pada akhir REPELITA III dengan biaya sekitar Rp 5,- milyar (lihat seksi 10.3.6. (a)). Pada umumnya daerah pedesaan akan mendapat prioritas karena tingkat pelayanannya saat ini adalah sangat kurang (lihat seksi 10.3.6. (a)). Untuk maksud ini aktifitas pelayanan kesehatan masyarakat pedesaan lebih lanjut hendaknya ditambahkan.

S.153 Kebijakan-kebijaksanaan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :

- (1) Pertimbangan hendaknya diberikan kepada penyediaan sepeda motor bagi Dokter - dokter untuk meningkatkan pelayanan ke daerah-daerah yang terpencil (lihat seksi 10.3.6. (b)).
- (2) Usaha-usaha hendaknya diarahkan untuk meng-upgrade satu Rumah Sakit Kabupaten dari tingkat D ke tingkat C untuk setiap Kabupaten (lihat seksi 10.3.6. (c)).
- (3) Rumah Sakit Propinsi yang ada di Purwokerto dan Surakarta hendaknya di-upgrade ke tingkat B pada akhir REPELITA III (lihat seksi 10.3.6. (c)).
- (4) Di tingkat Nasional penyediaan Dokter- dokter hendaknya ditingkatkan (lihat seksi 10.3.6. (d)).
- (5) Usaha-usaha hendaknya dibuat untuk mengefektifkan pekerja wanita yang mendapat latihan sebagai perawat (lihat seksi 10.3.6. (d)).
- (6) Usaha-usaha hendaknya dibuat melalui SD - SD dan mass media dengan menyediakan pendidikan umum pemeliharaan kesehatan dan K.B. (lihat seksi 10.3.6.(f)).

(7) Guna mendapatkan efektifitas yang besar dalam pelayanan penyuluhan yang diberikan oleh juru-juru rawat dan dokter-dokter Puskesmas, bantuan-bantuan dalam bentuk visuil termasuk poster-poster, pamlet-pamlet hendaknya dibuat dan didistribusikan (lihat seksi 10.3.6. (f)).

(d). Fasilitas-fasilitas pendidikan.

(i). S.D. (Sekolah Dasar).

S.154 Pembangunan fasilitas SD yang baru dan pengangkatan guru baru hendaknya direncanakan berlandaskan kenaikan jumlah murid-murid yang terdaftar di SD sebesar 3,6 % per tahun (lihat seksi 10.4.7. (a) (i)). Tingkat pertumbuhan ini hendaknya dipelihara sampai akhir REPELITA III. Investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan SD akan berjumlah sebesar Rp. 5.340,- juta per tahun berdasarkan tingkat harga 1976 (lihat seksi 10.4.5. (b)). Untuk menentukan lokasi SD yang baru, perbedaan dalam permintaan dan penawaran yang berbeda nyata di antara bagian-bagian yang berbeda di Propinsi ini hendaknya diperhitungkan. Secara umum prioritas hendaknya diberikan kepada daerah-daerah perkotaan daripada daerah pedesaan. Khususnya daerah-daerah berikut ini hendaknya mendapat prioritas-prioritas : Kodya Magelang, Kodya Surakarta, Kodya Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kodya Semarang, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Pati. (lihat seksi 10.4.7. (a).(i)).

S.155 Untuk perbaikan perencanaan pembangunan SD suatu pengumpulan data kependudukan yang sistimatis hendaknya dilaksanakan baik oleh Kanwil Pendidikan. Dinas Pendidikan atau Badan Koordinasi Pendidikan. Terutama usaha-usaha hendaknya dibuat untuk mengumpulkan penduduk dengan kohort umur 5 tahun untuk Kabupaten / Kotamadya setiap tahun (lihat seksi 10.4.7. (a).(i)).

S.156 Disamping itu kebijaksanaan-kebijaksanaan berikut direkomendasikan :

- (1) Mengembangkan SD -SD yang ada sekarang ketimbang membangun yang baru (lihat seksi 10.4.7. (a).(i)).
- (2) Mengurangi tingkat putus sekolah (lihat seksi 10.4.7. (a).(i)).
- (3) Menitik beratkan penataran guru-guru (lihat seksi 10.4.7. (a).(ii)).
- (4) Memperluas SPG dan STO yang ada sekarang ini dengan 100 % (lihat seksi 10.4.7.(a).(iii), dan meningkatkan kualitas pendidikan di SPG dan STO.

(ii). SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama).

S.157 Dasar untuk merencanakan fasilitas SLTP yang baru dan pengangkatan guru-gurunya hendaknya berdasarkan jumlah murid-murid yang terdaftar dengan kese-

- patan pengembangan sebesar 5 % per tahun pada akhir REPELITA III (lihat seksi 10.4.7. (b).(i)).
- S.158 Perluasan yang memadai dari IKIP dan PGSLP hendaknya dilaksanakan (lihat seksi 10.4.7. (b).(ii)).
- S.159 Dinas Pendidikan dan Kanwil Pendidikan hendaknya menyeragamkan pembuatan kebijaksanaan pendidikan untuk SD dan SLTP (lihat seksi 10.4.7. (c)).

(iii). SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas).

- S.160 Landasan perencanaan hendaknya didasarkan juga pada peningkatan jumlah pelajar tingkat 5 % per tahun pada akhir REPELITA III (lihat seksi 10.4.7. (d)).
- S.161 IKIP hendaknya ditambah secara memadai untuk menjamin penyediaan yang cukup dari guru-guru yang bermutu (lihat seksi 10.4.7. (d)).

(e). Perencanaan Pemukiman.

- S.162 Secara ideal, sebuah daftar tugas yang panjang diperlukan untuk dilaksanakan, tugas itu seperti : perencanaan kota, pengawasan penggunaan tanah, perlengkapan jalan, penyediaan air, tenaga, pembuangan air kotor dan sebagainya, konsep-konsep peraturan-peraturan bangunan, fasilitas pasar, pusat-pusat kemasyarakatan, rumah sakit - rumah sakit, sekolah-sekolah dan penyediaan regu pengaman dan pencegah kebakaran. Tetapi pada bagian lain, sumber-sumber untuk pengadaan hal-hal tersebut di atas sangat terbatas. Berdasarkan pandangan di atas dan berdasarkan pengamatan lapangan hal - hal berikut direkomendasikan (lihat seksi 10.5.).
- (1) Kemampuan merencana secara umum dari pemerintah daerah termasuk BAPPEDA dan lain-lainnya hendaknya ditingkatkan (lihat seksi 10.5. dan juga lihat Bab XII dan
 - (2) Terutama mengenai kemampuan perencanaan perkotaan hendaknya diperkuat di dalam pemerintah daerah.

S.2.10 PEMBANGUNAN SOSIAL.

(a). Aspek-aspek Sosial.

(i). Kepariwisataaan.

- S.163 Kepariwisataaan di masyarakat secara keseluruhan hendaknya ditingkatkan melalui :

- (1) Memperkenalkan sistim jasa dan perangsang (merit and incentive) kepada seluruh jenis-jenis organisasi, berbagai tingkat pemerintahan, organisasi koperasi dan sekolah-sekolah (lihat seksi 11.1.3. (b).(i).).
- (2) Menitik beratkan kepada ketidak ketergantungan keuangan pada organisasi-organisasi pemerintah (lihat seksi 11.1.3. (b).(ii).).
- (3) Penyediaan kredit bagi industri kecil yang sedang berjalan tetapi kekurangan modal untuk perluasan (lihat seksi 11.1.3. (b).(iii).).
- (4) Memperinci dengan ketat tugas pekerja pada organisasi-organisasi pemerintah dan membatasi pekerjaan sampingan mereka (lihat seksi 11.1.3.(b).).
- (5) Reorganisasi organisasi pendidikan formil dan non formil agar berbagai macam jenis dari teknik keahlian dapat diberikan dalam berbagai bentuk untuk yang dipekerjakan dan yang bekerja sendiri (lihat seksi 11.1.3. (b).(v).).

(ii). Organisasi kemasyarakatan dan program kesejahteraan.

S.164 Pembangunan organisasi-organisasi kemasyarakatan hendaknya diberikan perhatian. Rencana sosial jangka panjang yang komprehensif untuk memelihara standard kesejahteraan di masyarakat pedesaan hendaknya dipersiapkan dan koordinasi yang baik dari organisasi pemerintahan tentang hal ini diperhatikan (lihat seksi 11.1.3. (c).).

(b). Latihan Kejuruan dan Sistim Informasi Kerja.

(1). Macam latihan kejuruan untuk SMP.

S.165 Kebijaksanaan pemerintah yang ada sekarang ini memadukan macam latihan kejuruan untuk SMP ke dalam bentuk latihan kejuruan yang umumnya perlu ditunjang (lihat seksi 11.2.2. (b).).

(ii). Macam latihan kejuruan untuk SMA.

S.166 Kenaikan yang sedang dari macam latihan kejuruan untuk SMA diperlukan baik ditinjau dari segi kebutuhan tenaga kerja maupun dari prospek permintaan masyarakat untuk kesempatan pendidikan yang lebih besar. Titik berat pendidikan hendaknya diarahkan kepada persiapan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk bisa bekerja sendiri. Juga perbaiki tingkat pendidikan hendaknya dicari melalui penggunaan peralatan dan instruktur yang baik (lihat seksi 11.2.2. (b).).

(iii). Pusat Latihan Kejuruan.

S.167 Satu perluasan pusat latihan kejuruan direkomendasikan.

Sampai 1983 / 1984, 5 pemusatan latihan kejuruan teknik sebagai tambahan kepada 2 pusat latihan yang ada, 4 pusat latihan kerja kecil di bidang pertanian sebagai tambahan untuk 2 pusat yang ada, 1 pusat latihan manajemen sebagai tambahan 1 pusat latihan yang ada, pada saat ini sudah direncanakan. Pelaksanaan daripada pembentukan pusat-pusat latihan telah direkomendasikan (lihat seksi 11.2.2. (c)).

(iv). Sistim Informasi Kerja.

S.168 Untuk sistim informasi kerja di Jawa Tengah, perlu diperluas meliputi lokasi kesempatan kerja, termasuk lokasi di luar Pulau Jawa, hendaknya diteruskan cara-cara yang resmi perlu diciptakan untuk mendorong penggunaan sistim informasi oleh majikan untuk penerimaan pegawai (lihat seksi 11.2.2. (d)).

(v). Badan Ketenaga Kerjaan setempat dan Daerah.

S.169 Diusulkan untuk mendirikan suatu Badan Ketenaga Kerjaan tingkat Propinsi, juga Kotamadya dan Kabupaten. Badan-badan tersebut berperan untuk mengintegrasikan setiap usaha di Departemen-departemen dan sistim pendidikan yang terlihat di tingkat daerah. Khususnya, tanggung jawab yang besar hendaknya diberikan kepada Kantor Daerah di bawah Departemen Pendidikan dan Departemen Nakertranskop, dan suatu kerjasama serta koordinasi yang erat dari Departemen-departemen tersebut perlu diciptakan (lihat seksi 11.2.2. (e)).

(c). Keluarga Berencana.

S.170 Rekomendasi-rekomendasi untuk Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

(1) Karena adanya kenaikan dalam tingkat pertumbuhan penduduk selama dasa warsa mendatang, usaha harus diperluas dengan menyebar luaskan Keluarga Berencana daripada sebelumnya.

Tujuan tentative yang telah disusun team adalah mencapai tingkat yang saat ini terjadi di Jawa Timur, dalam arti peserta effective di tahun 1980 berada pada tingkat di atas 500 orang per 1000 wanita pada akhir REPELITA III (lihat seksi 11.3.3.(a)).

(2) Pemakaian IUD ditingkatkan melalui usaha-usaha yang intensif untuk mencapai pemakaian kontrasepsi yang lebih effective.

Sumber-sumber yang cukup hendaknya dialokasikan untuk membantu pemakaian yang sudah ada dan meningkatkan kualitas alat (lihat seksi 11.3.3.(a)).

- (3) Perbedaan geografis saat ini dalam tingkat penyebaran Keluarga Berencana hendaknya diatasi dengan usaha-usaha yang intensif ke daerah-daerah yang belum tercapai (lihat seksi 11.3.3.(a)).
- (4) Jumlah klinik-klinik Keluarga Berencana hendaknya dilipat duakan, agar rata-rata klinik mencakup 3.500 wanita terpilih sampai tahun 1983/1984. Klinik-klinik desa dianjurkan tumbuh dalam jumlah yang sedang, tetapi peningkatan kualitas sangat diperlukan. Unit-unit bergerak hendaknya ditingkatkan sehubungan dengan meningkatnya klinik-klinik Keluarga Berencana (lihat seksi 11.3.3.(c)).
- (5) Petugas lapangan Keluarga Berencana hendaknya diperkuat dan ditingkatkan hingga mencapai 11.000 petugas lapangan sampai dengan 1983/1984. Paguyuban digalakkan untuk organisisir di seluruh propinsi, bekerjasama dengan organisasi wanita yang ada (PKK). Tindakan-tindakan yang perlu harus diambil untuk meningkatkan perhatian yang cukup untuk berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (lihat seksi 11.3.3.(c)).
- (6) Penggunaan fasilitas umum yang lebih luas, termasuk di dalamnya sistim sekolah, Mass media, organisasi agama untuk mencapai penyebaran lebih lanjut dari konsep Keluarga Berencana (lihat seksi 11.3.3.(d)).
- (7) BKKBN di tingkat Propinsi harus diberikan tanggung jawab yang lebih baik dalam perencanaan dan keuangan, dari apa yang ada sekarang. Ada kecenderungan bahwa tujuan K.B. terlalu menekankan pada jumlah akseptor baru ini seharusnya diganti pada program yang lebih rational yaitu meningkatkan jumlah pemakaian tetap dan tujuan-tujuan lainnya (lihat seksi 11.3.3.(f)).

(d). *Transmigrasi*.

S.171 Rekomendasi-rekomendasi untuk program transmigrasi adalah sebagai berikut :

- (1) Jumlah transmigrasi yang ditargetkan team adalah 110.000 keluarga atau 550.000 orang untuk selama 5 tahun dari 1979/80 sampai 1983/84. Pertambahan jumlah transmigrasi hendaknya sebagian besar adalah transmigran spontan. Pemerintah Pusat hendaknya melibatkan diri pada pembangunan-pembangunan rencana-rencana baru di pulau-pulau lain di Luar Jawa dan menyusun target yang realistis kemampuan transmigrasi di masa depan (lihat seksi 11.4.3.(a). dan (b)).
- (2) Perlu diperluas dan ditingkatkannya latihan-latihan para pendatang/migrants (lihat seksi 11.4.3. (b)).
- (3) Perlu dipertimbangkan transmigrasi yang mempunyai keahlian selain keahlian bertani (lihat seksi 11.4.3. (b)).

(e). Perbandingan Transmigrasi dan Keluarga Berencana.

S.172 Rekomendasi untuk strategi kependudukan adalah sebagai berikut !

- (1) Biaya pengawasan kelahiran melalui Keluarga Berencana diperkirakan Rp. 36.000,- ini terlalu rendah dari biaya yang diperkirakan untuk mengurangi satu orang penduduk melalui transmigrasi sebesar Rp 440.000,- Dalam rangka pengurangan jumlah absolut penduduk, Keluarga Berencana adalah cara yang cukup murah (lihat seksi 11.5.4.).
- (2) Transmigrasi memberikan keuntungan pada ekonomi bangsa, karena program itu menghasilkan efek sampingan (external effect) yang besar. Namun demikian, Pemerintah Daerah hendaknya tidak tergantung hanya pada transmigrasi untuk mengurangi tekanan penduduk atau untuk menanggulangi masalah lapangan kerja, dan setiap usaha untuk memajukan K.B. hendaknya lebih diperhatikan. Akan tetapi hal ini tidak berarti meniadakan arti transmigrasi bagi Pembangunan Nasional (lihat seksi 11.5.4.).

S.2.11 ADMINISTRASI PERENCANAAN.

(a). Organisasi dan Proses Perencanaan.

S.173 Rekomendasi proses perencanaan dan organisasi perencanaan adalah sebagai berikut :

- (1) Fungsi perencanaan dan analisa multi sektoral hendaknya diperkuat di BAPPEDA dengan titik berat pada perbaikan efisiensi pengalokasian sumber-sumber (lihat seksi 12.4.1.).
- (2) Pernyataan-pernyataan yang lebih jelas sebaiknya dibuat dalam rencana-rencana pemerintah mengenai sasaran, prioritas dan hasil-hasil yang diharapkan dari strategi yang ditentukan (lihat seksi 12.4.3. (a).).
- (3) Koordinasi yang lebih baik sebaiknya dicapai dalam perencanaan dan pelaksanaan program di antara dinas-dinas, terutama di antara dinas-dinas yang erat hubungannya satu sama lain (lihat seksi 12.4.2. (b).).
- (4) BAPPEDA sebaiknya memperkenalkan konsep kelayakan ekonomi sebagai suatu kriteria yang penting bagi perencanaan evaluasi (lihat seksi 12.4.2. (c).).

(b). Program - program latihan.

S.174 Rekomendasi yang berhubungan dengan program latihan adalah sebagai berikut :

- (1) Daripada mengirimkan pejabat ke Luar Negeri, disarankan agar tenaga ahli sebaiknya diundang dari Luar Negeri untuk memberikan latihan dalam

perencanaan dan evaluasi proyek kepada pejabat yang berkecimpung dengan perencanaan di tingkat Propinsi, termasuk BAPPEDA.

Program utama sebaiknya untuk jangka waktu 2 tahun dan dilaksanakan oleh tenaga ahli yang diundang dari organisasi internasional negara-negara lain atau Pemerintah Pusat (lihat seksi 12.4.3. (a).).

- (2) Yang lebih umum, program latihan nasional yang ada sekarang sebaiknya diberikan sampai batas tertentu, bagi latihan pejabat di tingkat Pemerintah Daerah (lihat seksi 12.4.3. (b).).
- (3) Untuk pekerja atau staf teknis dan staf administrasi pada berbagai tingkat pemerintahan di Propinsi, dianjurkan agar pemerintah daerah melaksanakan kursus-kursus latihan kerja (on the job training) selama 2 minggu. Disamping itu, perlombaan/kontes keahlian teknis sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk merangsang peningkatan teknis inisiatif mereka sendiri (lihat seksi 12.4.3. (c).).

(c). *Perusahaan - Perusahaan Daerah.*

S.175 Perusahaan-perusahaan daerah mengalami perubahan-perubahan. Beberapa di antaranya dapat dirobah dalam organisasi-organisasi untuk letihan kerja sambil mempertahankan tingkat produksi mereka secara teratur. Sebagai tambahan, dua perubahan bentuk yang layak berikut ini sebaiknya diteliti :

- (1) mengubah beberapa diantaranya ke dalam usaha perkongsian (joint venture) dengan perusahaan swasta dengan sahan kira-kira 50 persen dipegang oleh sektor pemerintahan, dan
- (2) menggunakan perusahaan sebagai badan-badan untuk penelitian dan pengembangan (lihat seksi 12.4.4.).

(d). *Hubungan antar Pemerintah.*

S.176 Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seharusnya diteliti untuk meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber-sumber oleh pemerintah pusat dalam mencapai sasaran-sasaran nasional dan mendorong otonomi pemerintah daerah. Juga program INPRES sebaiknya diteliti untuk melihat apakah program INPRES ini memberikan hasil yang diharapkan dan apakah program ini mengurangi atau meningkatkan perbedaan pendapatan di antara kelompok-kelompok masyarakat (lihat seksi 12.4.5.).

S.2.12 ANGGARAN PEMBANGUNAN.

(a). *Alokasi Sumber-sumber Pembangunan Pemerintah.*

S.177 Relatif hanya sedikit saja perhatian yang diberikan kepada sektor industri pengolahan dalam hal alokasi sumber-sumber pembangunan pemerintah. Jumlah yang lebih besar dari sumber-sumber pembangunan pemerintah sebaiknya dialokasikan kepada proyek-proyek prasarana yang mendukung kegiatan-kegiatan industri swasta (lihat seksi 13.5.2. (a)).

(b). Pengerahan sumber-sumber sektor Pemerintah.

S.178 Penerimaan pajak daerah sebaiknya ditingkatkan melalui cara-cara perbaikan keadilan maupun peranan pemerintah, misalnya penilaian kembali nilai-nilai kekayaan, mengurangi penghindaran pajak dan menghidupkan kembali perusahaan-perusahaan daerah (lihat seksi 13.5.2. (b)).

S.179 Suatu studi yang komprehensif sebaiknya dilaksanakan untuk memperbaiki sistim dan peningkatan penerimaan dari pajak-pajak daerah (lihat seksi 15.5.2. (b)).

(c). Informasi Statistik.

S.180 Diperlukan suatu studi untuk perbaikan sistim pengumpulan dan pengolahan data dan peningkatan keseksamaan informasi. Dalam hubungan ini, introduksi mesin-mesin hitung listrik dengan ukuran besar yang juga berfungsi untuk percetakan sebaiknya dipikirkan (lihat seksi 13.5.2. (c)).

(d). Tabungan - tabungan Swasta.

S.181 Untuk meningkatkan tabungan sektor swasta sebaiknya inflasi diawasi (lihat seksi 13.5.2. (d)).

S.182 Usaha-usaha harus dilakukan untuk memperbaiki adanya kelancaran saham perusahaan untuk kepentingan masyarakat umum (lihat seksi 13.5.2. (d)).

(e). Promosi industri pengolahan ukuran kecil dan sedang.

S.183 Saran-saran untuk pembiayaan industri pengolahan kecil dan sedang adalah sebagai berikut (lihat seksi 13.5.2. (e)).

- (1) Kertas kerja yang diperlukan untuk memperoleh kredit melalui perusahaan industri pengolahan kecil dan sedang yang ada dan bakal ada sebaiknya disederhanakan.
- (2) Untuk mencapai alokasi sumber-sumber investasi yang lebih baik, kebijaksanaan suku bunga sebaiknya diteliti kembali. Khususnya pemikiran diberikan terhadap adanya penyamanan suku bunga untuk kredit sektor industri pengolahan dan sektor pertanian.
- (3) Untuk mencapai efisiensi ekonomi yang lebih besar peranan yang lebih besar harus diberikan kepada bank - bank swasta, bersesuaian dengan pengurangan peranan bank-bank nasional dan bank-bank pemerintah.

